



**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SKETSA
DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL BURUH PERKEBUNAN DI
SUMBERWADUNG, SILO, JEMBER**

***(ROLE NON-GOVERMENT ORGANIZATION (NGO) SKETSA IN SOCIAL
ASSEMBLY OF PLATATION WORKERS IN SUMBERWADUNG, SILO,
JEMBER)***

SKRIPSI

Oleh

Agung Kurniawan

140910301035

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**





**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SKETSA
DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL BURUH PERKEBUNAN DI
SUMBERWADUNG, SILO, JEMBER**

***(ROLE OF NON-GOVERMENT ORGANIZATION (NGO) SKETSA IN
SOCIAL ASSEMBLY OF PLANTATION WORKERS IN SUMBERWADUNG,
SILO, JEMBER)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Agung Kurniawan

140910301035

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Penulis dengan rasa syukur alhamdulillah dan bangga menyelesaikan karya ini, yang terkhusus penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih karena telah memiliki kesabaran dalam membimbing, menasehati, dan menyayangi penulis mulai kecil hingga saat ini.
2. Kedua kakakku yang tidak hentinya memberi motivasi, baik materil dan non materiiil. Yang sampai saat ini masih memberi hembusan semangat beurpa senyuman yang tiada hentinya.
3. Guru-guruku baik dlohir dan batin, dari sejak kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, yang sudah mendidik, dan memberikan ilmu pengetahuan serta banyak pelajaran bagi penulis.
4. Almamater Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Menjadi sebuah kebanggan sampai kapanpun.

MOTTO

Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman
dan tenaga badan daripada kelemahan¹

Memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara²



-
1. Nasehat Imam Ghazali
 2. Nasehat Sunan Kalijaga

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Kurniawan

NIM : 140910301035

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SKETSA Dalam Pendampingan Sosial Buruh Perkebunan Di Sumberwadung, Silo, Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Agung Kurniawan

NIM. 140910301035

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SKETSA
DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL BURUH PERKEBUNAN DI
SUMBERWADUNG, SILO, JEMBER
(*ROLE OF NON-GOVERMENT ORGANIZATION SKETSA IN SOCIAL
ASSEMBLY OF PLATATION WORKERS IN SUMBERWADUNG, SILO,
JEMBER*)**

Oleh

Agung Kurniawan

140910301035

Dosen Pembimbing
Arif, S.Sos., M.AP
NIP 197603102003121001

RINGKASAN

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sketsa Dalam Pendampingan Sosial Buruh Perkebunan Di Sumberwadung, Silo, Jember: Agung Kurniawan, 140910301035; 2018:123 halaman: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Buruh perkebunan di Sumberwadung masih hidup dalam garis kemiskinan. Pihak perusahaan yang tidak terlalu memperhatikan nasib buruh, dan sering memperlakukan buruh dengan tidak adil pula sewenang-wenang, menjadi penambah deret panjang permasalahan yang menimpa buruh. Kesejahteraan buruh pun masih belum bisa terpenuhi. Kemudian dari permasalahan tersebut, muncullah beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) datang untuk melakukan pendampingan secara sosial, salah satu LSM yang melakukan pendampingan secara sosial itu adalah Studi Kebijakan dan Transformasi Sosial (SKeTSA). Awalnya, mereka melakukan pendampingan kepada individu, kemudian kelompok, dan akhirnya secara makro yakni masyarakat. Bentuk pendampingan sosial LSM SKETSa pun dilakukan dengan pedoman realistis, sistematis, taktis, dan strategis. Yakni LSM SKETSa berperan sebagai broker, mediator, dan analis kebijakan dan aktivis sosial. Jika dikaitkan dengan ilmu kesejahteraan sosial, maka pendampingan sosial yang dilakukan oleh LSM SKETSa sama dengan praktik pekerjaan sosial, yakni pemberdayaan. Dapat dikatakan bahwa pendampingan sosial yang dilakukan oleh LSM SKETSa pada saat itu berhasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk peran lembaga swadaya masyarakat dalam pendampingan sosial terhadap buruh perkebunan di Sumberwadung. Penelitian ini berkaitan dengan pendampingan sosial LSM SKETSa kepada buruh untuk membantu menyelesaikan masalah dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di sekretariat LSM SKETSa dan di Sumberwadung, Silo, Jember. Penentuan

informan menggunakan teknik *purposive*, untuk informan pokok berjumlah 4 orang dan untuk informan tambahannya berjumlah 5 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur (*semi-structured*), observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Pengujian kebasahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang dikumpulkan menjelaskan bentuk peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) SKETSA dalam pendampingan sosial buruh perkebunan di Sumberwadung, Silo, Jember, dipaparkan secara deskriptif.

Penelitian ini membahas bentuk peran LSM SKETSA dalam pendampingan sosial buruh perkebunan yang meliputi: Pertama, secara mikro sebagai broker. Kedua, secara mezzo sebagai mediator. Ketiga, sebagai aktivis sosial dan analisis kebijakan. Peran – peran tersebut yang kemudian menjadikan buruh sadar akan diri, mandiri, dan akhirnya mampu untuk melakukan pendampingan untuk dirinya dan kelompoknya secara mandiri. Adapun indikator dari hasil pendampingan sosial LSM SKETSA dapat dilihat dari buruh berani mengungkapkan pendapat pada direksi, kebebasan relatif buruh, kesadaran politik buruh, kebebasan mobilitas buruh, terlibat dalam pembuatan keputusan, dan terakhir jaminan ekonomi buruh.

PRAKATA

Puji syukur alhamdulillah, saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Peran LSM SKETSA dalam Pendampingan Sosial Buruh Perkebunan di Sumberwadung, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Karya ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Selain itu, penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, agar kedepannya penulis mampu membuat karya yang lebih baik lagi. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Dr. Paeran, M.Si., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember
3. Bapak Syech Hariyono selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak Arif, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, kemudian memberi dukungan serta membabgi ilmunya kepada penulis. Yang semata-mata hanya agar penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah dari awal hingga akhir dengan baik.

Dengan segala hormat dan rasa syukur, saya harap ada kritik dan saran berbentuk membangun pada karya yang saya buat ini. Agar dapat bermanfaat untuk khalayak umum

Jember, 9 November 2018

Penulis

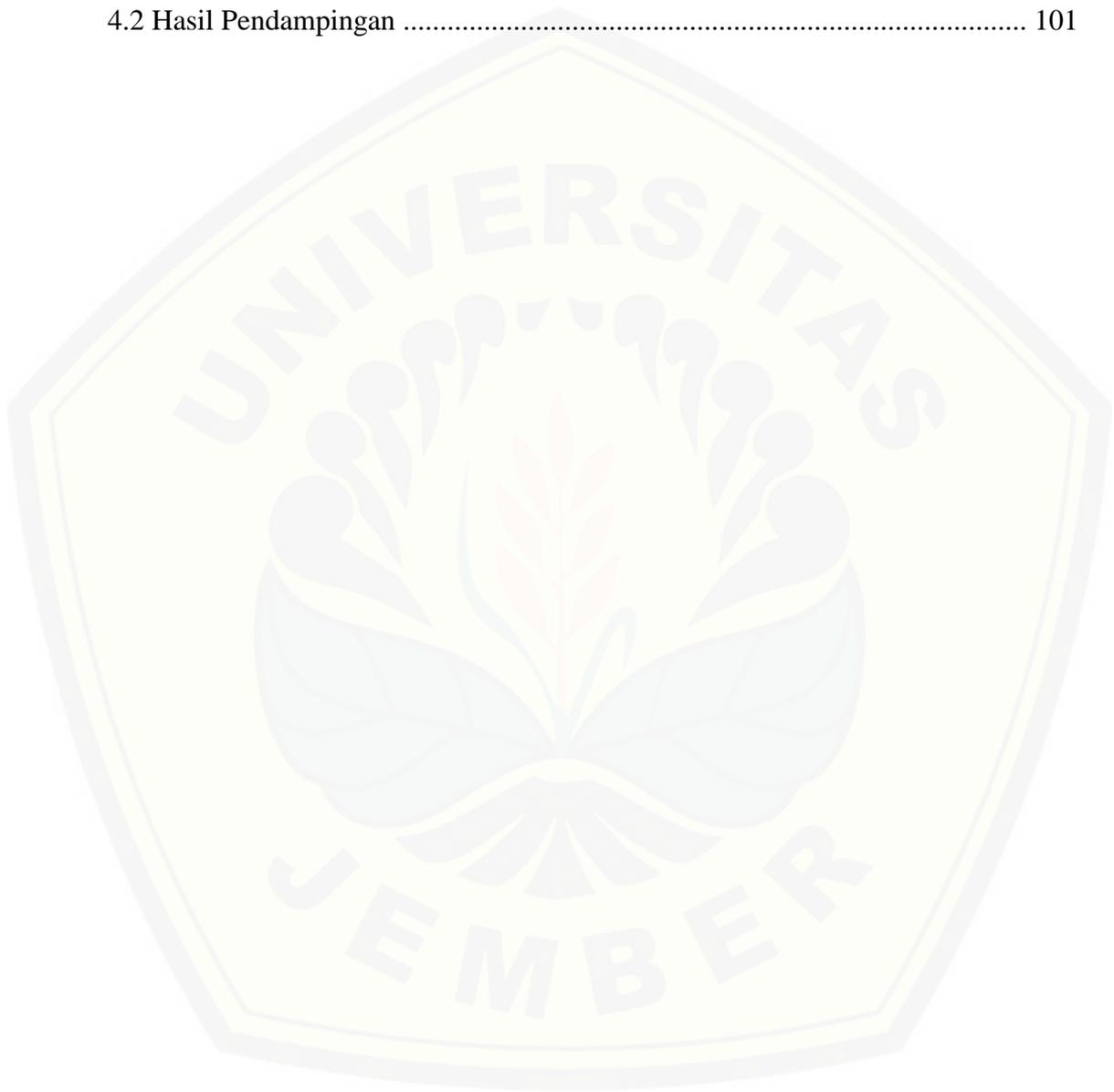
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Advokasi Sosial	11
2.2 Konsep LSM	19
2.3 Peran LSM dalam Advokasi Masyarakat	21
2.4 Buruh	26
2.4.1 Pengertian Buruh	26
2.4.2 Buruh Perkebunan	27
2.4.3 Jenis-Jenis Buruh	27
2.4.4 Stratifikasi dan Karakteristik Buruh	28
2.4.5 Kesejahteraan Hidup Buruh	31
2.5 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	37
2.6 Kerangka Berpikir	42
BAB III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Pendekatan Penelitian	43

3.2 Jenis Penelitian	44
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Teknik Penentuan Informan	50
3.6 Teknik Analisis Data	56
3.7 Teknik Keabsahan Data	58
BAB IV. PEMBAHASAN	61
4.1 Hasil Penelitian	61
4.1.1 Profil Buruh dan Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP)	61
4.1.2 Profil Lembaga Studi Kebijakan dan Tranformasi Sosial (SKeTSa)	67
4.1.3 Bentuk Peran Pendampingan Sosial LSM SKeTSa Terhadap Buruh Perkebunan	77
4.1.3.1 Bentuk Advokasi Sosial Sebagai Broker.....	79
4.1.3.2 Bentuk Advokasi Sosial Sebagai Mediator	84
4.1.3.3 Bentuk Advokasi Sosial Sebagai Aktivis Sosial dan Analisis Kebijakan	90
4.2 Pembahasan Penelitian	96
4.2.1 Hasil Advokasi LSM SKeTSa	96
4.2.1.1 Keberanian Buruh Mengungkapkan Pendapat Pada Direksi	102
4.2.1.2 Kebebasan Relatif	105
4.2.1.3 Kesadaran Politik.....	107
4.2.1.4 Kebebasan Mobilitas	110
4.2.1.5 Terlibat Dalam Pembuatan Keputusan	112
4.2.1.6 Jaminan Ekonomi	114
BAB V. PENUTUP	117
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

2.1 Tabel Strategi Advokasi	14
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	37
4.1 Jumlah Tenaga Kerja PDP Sumberwadung	64
4.2 Hasil Pendampingan	101



Daftar Gambar

2.1 Gambar alur berpikir	40
3.1 Gambar Analisis Data	52





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas bekerja pada bidang agraris, yakni sektor perkebunan dan pertanian. Bidang pekerjaan tersebut masih menjadi andalan penduduk Indonesia untuk mendapat rezeki. Seiring ketatnya persaingan kerja pula keterbatasan modal untuk bisa mengelola usahanya sendiri, tidak sedikit penduduk Indonesia yang memilih menjadi buruh. pekerjaan menjadi buruh tersebut, tidak lantas berjalan mulus tanpa ada hambatan. Jika berbicara permasalahan perburuan yang ada di Indonesia, jenis dan macamnya beragam. Misalnya, eksploitasi dan diskriminasi secara ekonomi yang dilakukan oleh pemilik atau pimpinan. Hal tersebut sudah bukan rahasia umum lagi, bahkan sudah seperti hal yang biasa sebab intenesitas seringnya permasalahan itu terdengar dan terlihat.

Perkebunan di Indonesia memiliki hubungan erat dengan sejarah kolonialisme. Artinya masih banyak budaya-budaya kolonialisme yang diterapkan pada sistem kerja yang ada di perkebunan, seperti memposisikan pimpinan mirip raja kecil dengan buruh sebagai budak. Jam kerjanya pun mirip dengan kerja rodi, tidak ada batasan waktu yang baku. Sedang Murbyanto, dkk, 1992 (dalam wiradi, 2001:223) mengatakan bahwa, sistem perkebunan di Indonesia mengalami perubahan dari usaha tambahan untuk usaha tani pangan menjadi satu sistem usaha tani yang memiliki skala ekonomi besar dan kompleks dengan ciri-ciri menggunakan areal pertanahan yang luas, padat modal, menggunakan tenaga kerja yang rinci dan struktur hubungan kerja yang rapi berteknologi modern dan berorientasi pada pasar. Jika menganut pengertian dari Murbyanto, maka perkebunan di Indonesia sudah seharusnya tidak seperti zaman-zaman kolonial, bukan malah sebaliknya.

Kabupaten Jember mempunyai Perusahaan Perkebunan, yang membawahi beberapa Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), diantaranya PDP Sumberwadung. Tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya, yang

berorientasi pada pasar atau profit. Tidak berbeda seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, perusahaan perkebunan di Jember juga memposisikan tenaga kerja atau buruh sebagai hal *urgent* / ujung tombak dalam menghasilkan *output* yang berkualitas. Meski sebagai ujung tombak dalam produksi, kesejahteraan buruh masih belum diperhatikan serius oleh PDP yang ada di Jember. Terkesan lebih mementingkan pengakumulasian modal, daripada kesejahteraan buruh. yakni dengan eksploitasi dan diskriminasi pada buruh, pula dengan tidak memberi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan aturan.

Menurut data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2017, Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbesar kedua, ada sebanyak 270.000 penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Data tersebut menjadi ironi tersendiri bagi wilayah dengan potensi yang mumpuni, Kabupaten Jember sudah seharusnya mampu untuk menekan kemiskinan dan menjadi kabupaten yang makmur, bukan malah sebaliknya. Sebab Kabupaten Jember memiliki beberapa perguruan tinggi yang dapat memberi sumbangsih pemikiran atau ide dan Sumber daya manusia untuk mengatasi hal tersebut. Namun, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Jember ibarat benang kusut yang sulit untuk diurai. Dilatarbelakangi oleh banyak faktor, setiap faktornya bercabang. Lantas permasalahan tersebut terus bergulir dan tidak tahu siapa yang memulai, memainkan, dan siapa yang bisa menghentikan.

Bola liar permasalahan tentang kemiskinan tersebut, juga merundung buruh yang ada di PDP Sumberwadung Jember. Berdasarkan lansiran koran tempo pada 17 April 2013 tertulis bahwa, buruh perkebunan di Jember melakukan demo di depan kantor Bupati dengan tuntutan supaya perusahaan tidak mementingkan kualitas *ouput* perusahaan saja, melainkan juga mementingkan nasib buruh. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Bupati agar turun tangan atas nasib buruh yang ada di PDP Sumberwadung untuk mendapat kesejahteraan. Pada saat itu, Bupati Jember bekerja sama dengan direksi perusahaan daerah perkebunan (PDP) untuk menandatangani Kerjasama Operasional (KSO) antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) dengan CV. Nanggala Citra Lestari. Dan

seperti terhembus angin saja, lalu berlalu. Seakan-akan kisah tersebut hilang dan tidak ada jalan penyelesaiannya.

Sebenarnya aturan atau undang-undang tentang perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan sudah ada sejak 2004 lalu, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2004. Hal tersebut menjadi payung hukum, serta sebuah bentuk perlindungan dan pengawasan yang ditujukan pada sektor perkebunan agar buruh sejahtera. Dalam undang-undang tersebut pun dijelaskan, selain untuk memperoleh profit, perusahaan perkebunan mempunyai tugas untuk menjamin kesejahteraan bagi para pekerja atau buruh. Seperti yang tercantum pada pasal 1, yaitu:

“Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.” Sumber: www.bpkp.go.id/uu/.../2/39/224.bpkp.

Meski areal perkebunannya luas dan produktifitas yang melimpah, namun perusahaan belum bisa mengimbangnya dengan pemberian kesejahteraan bagi para tenaga kerja. Pasalnya, masih banyak buruh perkebunan yang hidup dalam garis kemiskinan. Pasal 1 undang-undang no 18 tahun 2004 di atas menguatkan bahwa sebenarnya buruh sudah seharusnya memiliki ilmu dan pengetahuan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan. Apabila buruh yang diperkerjakan mempunyai tingkat pendidikan rendah, maka hal tersebut jika tidak dibendung atau ditangani, maka akan menimbulkan sebuah kekacauan, yaitu rawan bagi seorang buruh melakukan demo pada perusahaan. Dan sudah semestinya perusahaan dan buruh memiliki hubungan yang saling membantu dan menolong bukan malah semakin menjatuhkan.

Mengenai pengupahan kepada buruh sebenarnya sudah ditentukan dengan mengikuti UMK yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. UMK yang ada di Jember, ialah sebesar RP. 1.910.000,00. Dan tahun 2019 akan naik sebesar Rp. 2.100.000,00. Namun ternyata hal tersebut tidak dapat dinikmati oleh semua buruh perkebunan. Seperti lansir berita online oleh Purba (2015) bahwa,

perbedaan upah antar buruh terjadi karena perbedaan kategori, hal tersebut dikatakan oleh Diruktur PDP Kahyangan Kabupaten Jember. Ternyata dalam PDP ada dua jenis buruh, yaitu buruh borongan dengan buruh tetap. Soal gaji, buruh borongan akan mendapat gaji sesuai dengan produktifitas pekerjaan, sedangkan buruh tetap akan digaji sesuai kesepakatan di awal. Dan pengangkatan buruh borongan ke buruh tetap juga menjadi permasalahan sendiri, pasalnya tidak ada aturan yang jelas dari perusahaan dalam pengangkatannya. Dan terkesan, buruh borongan sulit diangkat menjadi buruh tetap. Karena alasan penekanan biaya pengeluaran perusahaan. Dengan penjelesan tersebut, jelaslah bahwa buruh yang ada ditingkat bawah rawan untuk mendapat diskriminasi dan eksploitasi, sebab buruh masih berpendidikan rendah serta golongan pekerjaannya masih belum bisa menerima gaji sesuai UMK.

Seperti data dari BPS terakhir, mayoritas penduduk Kabupaten Jember bekerja pada sektor perkebunan dan pertanian. Menurut data BPS terakhir, sekitar 538.978 dari 1.028.926 pekerja yang ada di Kabupaten Jember bekerja sebagai seorang buruh terlebih buruh harian lepas, borongan dan musiman. Buruh-buruh tersebut kerap mendapat merupakan tentang kurangnya pemenuhan kesejahteraan hidup. Antara lain upah murah, subordinasi oleh perkebunan, dan eksploitasi. Pada buruh harian lepas, umumnya belum memiliki kontrak kerja yang jelas serta kurangnya jaminan atas pemenuhan hak-hak. Data tersebut menjadi penguat, bahwa nasib buruh memang jauh dari kata sejahtera. Pula tidak ada solusi tepat yang bisa dilakukan.

Pada tahun 2014 tercatat, buruh di Jember kembali melakukan aksi, yang dilakukan di depan kantor direksi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Mereka kembali melakukan aksi dengan tuntutan, yaitu pemenuhan pemberian upah minimum, status buruh, jaminan kesejahteraan, hak istirahat dan cuti, keselamatan kerja, dan pemenuhan THR. Pula mereka merasa pekerjaannya selama puluhan tahun tidak diperhatikan oleh perusahaan perkebunan. Hal tersebut, ditengarai lantaran mereka merasa telah terjadi tindak penyelewengan dan diskriminasi yang di lakukan oleh perusahaan. Lagi-lagi aksi yang dilakukan oleh buruh hanya terlihat gerakan hura-hura semata tanpa ada hasil yang jelas.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa, kondisi mayoritas buruh perkebunan di Desa Sumber Wadung masih memprihatinkan. Mereka memperoleh ketidakadilan dan penindasan. Praktik-praktik menindas dan perlakuan tidak adil tersebut sudah berjalan sejak lama, dan tidak ada yang mengetahui bahwa mereka tengah mendapat perlakuan seperti itu, dan sebagian lagi sudah mengetahui akan tetapi tidak bisa melakukan apa-apa dan memilih untuk diam saja. Perlakuan tersebut meliputi tidak diberinya hak-hak normatif, jaminan kerja, sistem kerja yang tidak sesuai, dan durasi kerja yang tidak terbatas. Dengan upah yang tidak sesuai dengan UMK.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut mulai dari usaha-usaha perlawanan kecil-kecilan dengan kerja yang tidak sesuai dengan aturan, misal perlawanan dengan mencampur getah karet dengan air, datang tidak tepat waktu dan lain-lain, pula melalui bantuan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). LSM SKETSA merupakan lembaga yang saat itu ikut menangani permasalahan yang menimpa buruh di Sumberwadung. Sebuah lembaga nirlaba yang beraktifitas dalam wilayah kebijakan dan transformasi sosial. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat SKETSA ini memiliki tujuan pembebasan terhadap segala bentuk dominasi dan penindasan dalam bentuk apapun, baik agama dan ideologi. Karena pada masyarakat yang hegemonik tidak akan ada peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan diri. Dengan melakukan pemandirian masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan dapat melakukan percepatan-percepatan sosial secara konsisten tanpa harus menggantungkan diri pada negara termasuk simpul-simpul masyarakat. Sehingga akan terlihat bagaimana proses interaksi sosial secara sehat dan meminimalkan terjadinya manipulasi-manipulasi atas kepentingan-kepentingan, karena ada transparansi dan kontrol didalamnya.

LSM SKETSA memiliki orientasi untuk membentuk masyarakat sipil yang kokoh (*civil society*). Masyarakat sipil yang dimaksudkan adalah masyarakat yang mempunyai nilai tawar terhadap negara. Tidak hanya secara fisik saja, melainkan kekuatan rasional juga. Maka dari itu, tidak ada lagi sekat-sekat yang

terbangun karena perbedaan, baik pangkat, suku, agama, ras, dan golongan. Karena cita-cita *Civil Society* adalah terbangunnya komunikasi yang lancar antar individu-individu, individu-kelompok. Dan kelompok-kelompok.

LSM SKETSA menggunakan strategi komunikasi-emansipatoris, hal tersebut dipilih karena tidak terlepas dari proses sejarah Indonesia yang dipenuhi oleh sistem sosial dan politik yang hegemonik. Bahkan, dibangun atas dasar kekerasan, baik batiniah maupun fisik. Maka dari itu, LSM SKETSA menggunakan komunikasi (dialog) secara emansipatoris (sejajar), dengan tujuan menghilangkan segala bentuk dominasi dapat dieliminasi atau dihilangkan.

Lembaga Swadaya Masyarakat SKETSA tidak membatasi diri hanya pada pengembangan wacana melalui pelatihan dan pendidikan, maupun forum-forum sharing wacana lainnya. Namun, SKETSA juga bergerak pada bidang advokasi atau pendampingan-pendampingan terhadap permasalahan serta kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, selain itu juga melakukan riset-riset partisipatoris, serta mengkaji dan mensosialisasikan melalui media yang dimiliki SKETSA.

Adapun bentuk-bentuk konkret program yang dilakukan oleh SKETSA, diantaranya: Pertama, membentuk masyarakat sadar akan potensi, sadar posisi, serta mampu melakukan internalisasi dan refleksi diri. Kedua, membangun solidaritas sosial melawan segala bentuk penindasan. Ketiga, melakukan telaah tradisi guna mengartikulasikan tradisi-tradisi, nilai, nilai, ideologi, agama, kearifan lokal, dan sebagainya menjadi kekuatan yang utuh sebagai pilar perubahan.

Lembaga SKETSA mempunyai dua divisi, yaitu, Divisi Kebijakan Publik dan Divisi Perburuhan. Biasanya kegiatan-kegiatan yang kerap dilakukan oleh SKETSA, diantaranya: pendidikan dan pelatihan, penerbitan buku atau media pers lainnya, seminar dan sejenisnya, pula advokasi. Dalam advokasi, Lembaga ini melakukan dua model, yaitu litigasi (jalur hukum di pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam sejarahnya, LSM ini membentuk sebuah masyarakat buruh menuju madani.

Sebagai langkah pendampingan secara sosial, LSM SKETSA membentuk sebuah serikat buruh bernama SEBUK (Serikat Buruh Untuk Kemakmuran) pada

tanggal 11 Maret 2001. Terbentuknya serikat tersebut tidak lepas dari campur tangan SKETSA. Tujuan dari dibentuknya serikat tersebut, ialah untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingan kaum buruh secara total.

Dalam hal ini, LSM SKETSA melakukan kegiatan mempertahankan, mencampuri, mendukung, atau merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan individu, kelompok, atau masyarakat. Dengan tujuan untuk menjamin atau menopang keadilan sosial. Dengan begitu, LSM SKETSA telah melakukan sebuah pendampingan sosial mirip dengan pemberdayaan demi terwujudnya masyarakat yang berdaya, guna merubah kondisi masyarakat dari pra sejahtera menuju sejahtera. Dengan melakukan pendampingan sosial terhadap buruh perkebunan di Sumberwadung, Silo, Jember diawali dengan individu, kelompok, hingga masyarakat itu, LSM SKETSA telah berperan mirip dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh pekerjaan sosial.

Dalam permasalahan buruh perkebunan yang terjadi di Sumber Wadung, LSM berusaha untuk memenuhi tuntutan mereka melalui pendidikan politik, kebijakan, mengajari proses lobi, mediasi, hingga LSM SKETSA terjun langsung untuk ikut menyuarakan tuntutan. LSM SKETSA juga menghubungkan buruh dengan anggota DPRD Kabupaten Jember, mengubungkan dengan pewarta lokal hingga nasional, dan kepada Lembaga Bantuan Hukum. LSM SKETSA juga ikut mendampingi pembentukan SERBUK (Serikat Buruh Untuk Kesejahteraan), mulai dari peresmiannya di DISNAKERTRAN, juga ikut dalam mendampingi SERBUK agar menjadi organisasi yang baik dan benar. Hal ini dilakukan guna untuk perbaikan dan perubahan kehidupan buruh dari kesulitan menuju keberdayaan. Proses yang dilakukan oleh LSM tersebut membuat sebuah pertanyaan, “seberapa kuat daya pendampingan sosial yang dilakukan oleh LSM SKETSA?”. Menjadi sangat menarik kemudian untuk dikaji lebih mendalam bahwa, pendampingan sosial yang dilakukan oleh LSM SKETSA seperti praktik-praktik pekerja sosial. Yakni, mempunyai andil sebagai penunjang, pengembangan, dan penyembuhan. Karena dalam studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, juga dipelajari bagaimana kemudian cara untuk melakukan pendampingan menuju sejahtera, baik individu, kelompok, maupun masyarakat.

Topik penelitian yang membahas tentang bentuk peran pendampingan sosial LSM ini berkaitan erat dengan pengertian pekerjaan sosial menurut Isbandi Rukmianto Adi (2013:4), mengatakan bahwa, praktik kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah untuk peningkatan taraf hidup manusia dan menyeimbangkan kembali ketidakadilan dan penderitaan yang dialami warga masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pergerakan LSM sama dengan praktik seorang pekerja sosial yang ada di Ilmu Kesejahteraan Sosial. Yakni LSM SKETSA telah melakukan proses penyembuhan masalah, menunjang agar masalah tersebut tidak terulang, juga mengembangkan kapasitas seorang buruh agar tidak mudah untuk dipermainkan.

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk peran LSM SKETSA dalam pendampingan sosial pada buruh perkebunan. Yakni sebuah penelitian untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk peran yang diterapkan oleh LSM SKETSA dalam melakukan pendampingan sosial pada masyarakat yang berprofesi sebagai buruh di PDP Sumberwadung. Pendampingan sosial oleh LSM tersebut, nantinya akan menjadi bahan rujukan bagi seorang Peksos dalam praktik-praktik pekerjaan, terlebih kepada buruh.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah menurut Usman dan Akbar (2005:16) merupakan, kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Sedangkan pengertian rumusan masalah berbeda dengan pengertian masalah saja. Menurut Sugiyono (2001:35), rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Senada dengan pengertian di atas, pengertian rumusan masalah menurut Kountur (2003:35) mengatakan bahwa, rumusan masalah penelitian adalah suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena. Dari definisi-definisi diatas, dapat ditarik benang merah, bahwa rumusan masalah penelitian merupakan suatu rangkain pertanyaan yang dirumuskan karena adanya

perbedaan antara kondisi ideal dengan kenyataan untuk kemudian dapat diteliti lebih lanjut dan ditemukan kebenarannya.

Dari definisi di atas, peneliti menemukan suatu permasalahan terkait kondisi buruh yang belum sejahtera menjadi berdaya dan akan menuju masyarakat sejahtera dengan didampingi secara sosial oleh LSM SKETSA. Permasalahan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan masalah, “bagaimana bentuk Peran dan hasil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SKETSA dalam Pendampingan Sosial Buruh Perkebunan di PDP Sumber Wadung, Silo, Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Motivasi dan tujuan penelitian pada dasarnya adalah sama, yakni refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian (Arikunto, 2006)

Tujuan penelitian merupakan gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk peran dan hasil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SKETSA dalam Pendampingan Sosial Buruh di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumberwadung, Silo, Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Yakni tingkat kepercayaan terhadap sebuah hipotesis yang akan menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Manfaat penelitian merupakan pemaparan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. (Rudi Wibowo dkk, 2016)

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian bagi kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan masyarakat luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian

yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih kepada pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Khususnya, terkait praktik pekerja sosial dalam melakukan pendampingan sosial

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah terkait pola perumusan kebijakan. Hal inilah yang kemudian memberikan pencerahan bagi pemerintah agar benar-benar memperhatikan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh, misal, buruh perkebunan di PDP Sumber Wadung, Silo, Jember.

c. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, sehingga muncul tanggapan positif yang nantinya dapat menggerakkan masyarakat secara terstruktur dan terorganisir.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan teori dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penggunaan teori pada penelitian kuantitatif. Karena pada penelitian kualitatif, teori bukan acuan atau pendoman. Namun, hanya sebagai bekal pengetahuan untuk kemudian didialogkan dengan data penelitian, sehingga mendapatkan hasil akhir yang disebut akademis. Menurut Bungin (2011:23) bahwa:

“Sebagaimana *stereotype* dalam penelitian kualitatif, terkadang ketika suatu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti cenderung dipengaruhi oleh *stereotype* teoritis kualitatif dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal, pada prinsipnya, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dengan demikian teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.”

Fenomena buruh dan kesejahteraan telah menjadi banyak pembicaraan, tak terkecuali akademisi. Hal tersebut, terbukti dengan banyaknya kajian serta teori yang membahas mengenai keduanya. Seiring banyaknya permasalahan yang ditimpa oleh buruh, diringi pula kemunculan LSM yang memfokuskan kajian dan gerakannya ke sana. Hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya buruh yang mendapat permasalahan dan buruh tersebut membutuhkan bantuan dari luar dirinya untuk menyuarakan aspirasi mengenai kesejahteraan.

Masih menurut Bungin (2011:24), teoritisasi dalam penelitian kualitatif mempunyai dua model, yaitu:

- a. Deduksi, teori menjadi alat peneliti sejak memilih dan menemukan masalah hingga menganalisis data. Model penggunaan teori digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif, biasanya.
- b. Induksi, teori bukan menjadi sebuah hal yang penting, justru data yang paling penting. Biasanya, digunakan pada penelitian deskriptif verifikatif. Penggunaan teori hanya untuk memahami obyek penelitian, sehingga pada pengumpulan data lebih mudah.

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus mempunyai konsep dasar berupa teori yang akan digunakan sebagai bahan dalam mengkaji

fenomena sosial yang kemudian dapat dijadikan landasar berpikir peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam landasar berpikir tersebut, dapat menjadi dasar pemikiran seorang peneliti dalam mengupas sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya. Jika dapat digambarkan, bahwa teori tersebut yang menjadi penunjuk arah bagi peneliti, kemana arah penelitian akan dilakukan untuk mengkaji persoalan yang akan diteliti, sehingga alur yang penelitiannya dapat dengan jelas diketahui alur dalam mencari jawaban atas perumusan masalahnya.

2.1. Peran dan Peranan

Jika berbicara konsep peran dan peranan, sudut pandang yang biasa digunakan adalah sosiologi dan psikologi sosial, yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Misalnya, ibu-ibu, manajer, dan guru. Peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang bergantung pada konteksnya; berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. (George Ritzer, 2007:3959-3962)

Meski kata peran sudah ada di berbagai Bahasa Eropa selama berabad-abad. Namun, secara sosiologis istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920 dan 1930-an. Teori peran ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai perilaku sosial, seperti:

1. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi diantara posisi khusus heterogen yang disebut peran
2. Peran sosial mencakup bentuk perilaku wajar dan diizinkan, dibantu oleh norma sosial yang umum diketahui. Dan karena itu, mampu menentukan harapan.
3. Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial –yaitu ketika menganggap peran tersebut sah dan konstruktif. Mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran
4. Peran ditempati oleh individu yang disebut aktor

5. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial dianggap kadaluarsa atau tidak sah. Yang dalam hal ini tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran
6. Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan cara proposial, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran. (George Ritzer, 2007:3959-3962)

Setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk pemikiran atau tingkah laku serta perbuatan tertentu. Apabila seseorang telah mewujudkan hal tersebut, maka dikatakan individu tersebut telah menjalankan perannya. Seperti yang dijelaskan oleh Soekanto (1990:268) bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan.

Soekanto juga menyatakan bahwa tidak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peran. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa peranan merupakan fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat menjalankan fungsinya karena posisi yang dimilikinya tersebut. Sedangkan apabila berbicara tentang peran, maka akan cenderung unit kultural yang mengacu pada hak dan kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya.

Selanjutnya Mas'ood dalam Mufahir (2013) membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi. Ditunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku pada peran yang dijalankannya. Sedangkan peran institusi yang dideskripsikan secara behavioral, model dari teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.

Peran sosial pada seseorang dapat berbeda-beda ketika menyangkut status yang berbeda. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama wanita harus berada di sebelah kanannya/ samping luarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, peran dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma, karena peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang.
3. Peran merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Waluya, Bagja: 2007).

Struktur peran menurut Baeur (2003:99) dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Peran Formal, peran yang nampak jelas, yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
2. Peran Informal, peran tertutup, yaitu peran yang bersifat implisit atau emosional, biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Pada akhir tahun 1960-an, Henry Mintzberg, seorang lulusan MIT, melakukan penelitian seksama terhadap orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka. Berdasarkan observasinya, Mintzberg menyimpulkan bahwa manajer melakukan sepuluh peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling erat. Seperti yang diperlihatkan dalam table di bawah ini, kesepuluh peran ini bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

Peran antarpersonal, sebuah peran yang mempunyai tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Contohnya, ketika rektor perguruan tinggi memberikan ijazah pada acara wisuda, ia akan berperan sebagai tokoh utama

(*figure head*). Peran kepemimpinan, yang mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran antarpersonal juga meliputi peran penghubung, merupakan sebuah aktivitas sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada pimpinan,

Peran Informasional, merupakan peran untuk pengumpulan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan serta masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan semacamnya, Mintberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau.

Peran pengambilan keputusan, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam penyelesaian masalah, peran dilakukan dengan tindakan korektif untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, peran bertanggung jawab menyediakan sumber daya, baik dari manusia, fisik, hingga moneter. Sebagai negosiator, peran untuk mendiskusikan pelbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi unit sendiri. Peran kewirausahaan, merupakan peran untuk memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi.

Tabel 2.1 Peran Menurut Henry Mintzberg.

Peran	Deskripsi
Antarpersonal	
Tokoh Utama	Pemimpin Simbolis; diwajibkan melakukan sejumlah tugas rutin dari sebuah lembaga hukum atau sosial
Kepemimpinan	Bertanggung jawab memotivasi dan mengarahkan karyawan

Penghubung	Mempertahankan jaringan koneksi luar yang memberikan pertolongan dan informasi
Informasional	
Pemantau	Menerima pelbagai informasi; bertindak sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal organisasi
Penyebarnya	Meneruskan informasi yang diterima dari orang luar
Juru Bicara	Meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijaksanaan, tindakan dan hasil organisasi; bertindak selaku ahli dalam keuangan organisasi
Pengambil Keputusan	
Kewirausahaan	Mencari Peluang dalam organisasi dan lingkungannya, serta memprakarsai proyek-proyek untuk membuat perubahan
Penyelesai Masalah	Bertanggung jawab atas tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak terduga
Pengalokasian Sumber Daya	Membuat atau menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang signifikan
Negosiator	Bertanggung jawab mewakili organisasi dalam negosiasi-negosiasi besar.

Sumber: Diadaptasi dari *The Nature of Managerial Work* oleh H.Mintzberg

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa, peranan merupakan pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan

demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya Wirutomo (1981:99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa, dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegang. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan kepada individu yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maskudnya mewajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan, keluarga, dan peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya, dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: Pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. Kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranan atau kewajiban. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Peranan dapat dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerjam penetapan tujuan, dan peran. Parwoto dalam Soehandy (2007:28) mengemukakan bahwa peranan mempunyai ciri-ciri:

1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi term)
4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain
5. Peran masyarakat: sebagai subyek

2.2 Konsep LSM

Seiring dengan berkembangnya dan kompleksnya masyarakat, baik gerakan masyarakat maupun kelompok kepentingan yang lain. Keberadaan

organisasi masih dianggap perlu sebagai salah satu sarana perjuangan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang disepakati. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), merupakan sebuah gerakan kemasyarakatan dengan ciri-cirinya yaitu organisasi diluar organisasi pemerintahan, tidak bermotif keuntungan dalam kegiatannya, lebih melibatkan anggota dalam kegiatannya, keanggotaan yang bersifat massal, melakukan kegiatan anggota dalam kegiatannya, serta cukup berkepentingan akan ideologi. (Arbi Sanit, Hal. 51)

Sedangkan menurut Rierin (2009), secara harfiah LSM atau NGO berasal dari bahasa Inggris. Juga dikenal sebagai onop atau ONP (Organisasi Non Pemerintah). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar, organisasi non pemerintah dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut:

1. Organisasi ini bukan dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara.
2. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan memperoleh keuntungan (nirlaba)
3. Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi atau organisasi profesi.

Dalam arti umum, pengertian LSM mencakup semua organisasi masyarakat yang berbeda diluar struktur dan jalur formal pemerintahan, dan tidak dibentuk oleh dan merupakan bagian dari struktur pemerintah. Istilah LSM secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa, LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pula menitikberatkan kepada pengabdian secara pengabdian secara swadaya.

Philip Eldridge dalam Mansour Fakhri membagi tipologi atau kategorisasi LSM dalam pendekatan berdasarkan kegiatan, serta mendefinisikan gerakan LSM Indonesia menjadi 2 kategori: Pertama, LSM dengan label pembangunan, berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, macam irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan, dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Kedua, LSM mobilisasi, organisasi yang memusatkan perhatian pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin sekitar isu; ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma, dan penghuni liar di kota-kota besar.

Sedangkan menurut Zulfan Heri dalam penelitiannya, yang kemudian menghasilkan beberapa temuan terkait LSM, dan salah satunya adalah tipe-tipe LSM sebagai berikut:

1. LSM kontraktor, termasuk LSM yang berwajah ganda. Artinya, seringkali dalam pelaksanaannya meneriakkan perjuangan atas nama rakyat, namun dibalik itu semua mereka bekerja hanya untuk kelompoknya –hanya agar proyeknya jatuh kepada kelompoknya.
2. LSM beku operasi, dapat dikatakan sebuah LSM yang hanya meraup keuntungan, dan kemunculannya bagai siluman. Kadang kala dirasakan keberadaannya, kadang kala suara dan aktivitasnya hilang tanpa jejak.
3. LSM pencari laba, karakteristik LSM demikian biasanya betul-betul berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekalipun isu, program dan lingkup kegiatannya berorientasi untuk memperjuangkan masyarakat, akan tetapi semua itu dikemas agar mendapat daya simpatik publik dan pemberi dana.
4. LSM wakil pemerintah, biasanya LSM macam ini dibentuk oleh unsur PNS (birokrat). Kehadiran LSM ini, lazimnya selalu berhadapan dengan LSM yang memosisikan diri sebagai mitra kritis dan bersikap oposisi dengan pemerintah daerah. Pula sering mengintip proyek-proyek pembangunan yang tertuang dalam APBD.

5. LSM perjuang grassroots, kehadirannya berangkat dari komitmen moral dan kepedulian sosial yang tinggi untuk membela masyarakat grassroots yang berada dalam posisi lemah dan marjinal. Keberadaannya dihadapan pemerintah daerah sebagai mitra kritis.

2.3 Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Pendampingan sosial juga merupakan proses membangun dan memberdayakan masyarakat, artinya dalam pendampingan sosial perlu melibatkan proses dan tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Edi Suharto, 2005:93).

Prinsip utama dalam pendampingan sosial adalah *“making the best of the client’s resources”*. Sejalan dengan perspektif kekuatan, dalam praktik melakukan pendampingan sosial tidak perlu memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah. Bagian dari pendekatannya adalah dengan menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien memanfaatkan klien memanfaatkan hal itu. Pendampingan sosial sendiri berpusat pada empat bidang atau fungsi yang dapat disingkat menjadi 4P, yakni pemungkin (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan dukungan (*supporting*) (Edi Suharto, 2005:94-95).

Menurut Edi Suharto (2005: 97-103), mengacu pada pengertian Parson, Jorgensen, dan Hernandez (1994), dalam praktik pekerjaan sosial ada beberapa peranan penting saat melakukan pendampingan sosial, diantaranya:

1. Peranan sebagai fasilitator atau pemungkin (*enabler*) memiliki tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transasional. Strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan atau ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal serta aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.
2. Peranan sebagai broker, yakni berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi sehingga klien mendapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Peranan sebagai broker mencakup penghubungan klien dengan barang-barang dan pelayanan dan pengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan sebagai broker, yaitu:
 - a. Menghubungkan (*linking*) adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan.
 - b. *Goods* adalah barang-barang yang nyata, seperti makanan , uang, pakaian dan perumahan. Sedangkn *services*
 - c. *Quality Control* adalah sebagai pengawas kualitas yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga sesuai dengan kualitas yang ditetapkan.
3. Peranan sebagai mediator, yakni menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan dengan upaya serta usaha yang pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*).
4. Peranan sebagai pembela, namun peranan ini akan diambil manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klie, maka peranan

sebagai pembela (advokat) diambil. Peranan sebagai pembela dibagi menjadi dua, diantaranya: Pertama, pembelaan kasus yakni, apabila pembelaan dilakukan secara individu. Kedua, pembelaan kausal yakni, apabila pembelaan dilakukan secara kelompok atau masyarakat. Dalam peranan sebagai pembela, ada beberapa *setting* yang dilakukan. Untuk *setting mikro* ditujukan kepada individu dengan berperan sebagai *broker* atau penghubung. Sedang pada *setting mezzo* ditujukan kepada keluarga atau kelompok dengan berperan sebagai *mediator*. Sedang pada *setting makro* ditujukan kepada masyarakat dengan berperan sebagai analis dan aktivis sosial.

5. Peranan sebagai pelindung, yakni tanggungjawab terhadap masyarakat dengan dilindungi oleh hukum. Dan hukum tersebut memberi *legitimasi* kepada pelindung untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam praktiknya, peranan ini dimainkan berdasar kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial.

Kegiatan pendampingan sosial seringkali dilakukan atau melibatkan dua strategi utama, yakni pelatihan dan advokasi atau pembelaan masyarakat. Pelatihan dilakukan guna meningkatkan kapasitas pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya serta meningkatkan keterampilan keluarga dalam meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan advokasi atau pembelaan adalah bentuk keberpihakan terhadap kehidupan masyarakat yang diekspresikan melalui serangkaian tindakan politis yang dilakukan secara terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan (Edi Suharto, 2005: 103:104).

Menurut Edi Suharto (2005:104) ada lima tahapan penting dalam melakukan pendampingan sosial, khususnya dalam melakukan pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat:

1. Motivasi, yakni masyarakat didorong agar dapat memahami nilai, kebersamaan, interaksi sosial, dan kekuasaan melalui pemahaman haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, yakni dilakukan dengan pendidikan dasar, imunisasi, dan sanitasi.
3. Manajemen diri, yakni kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri, seperti melakukan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan atau kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.
4. Memobilisasi sumber, yakni sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.
5. Pembangunan dan pengembangan masyarakat, yakni pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan kemampuan para anggotanya membangun dan mengembangkan jaringan dengan berbagai sistem yang ada dilingkungannya.

Analisis kebijakan sosial merupakan hal penting yang harus dipahami dan dikuasai ketika akan melakukan praktik-praktik pekerjaan sosial, terutama yang akan bekerja pada *setting makro*. Sebab pada *setting makro* tidak hanya melibatkan seperangkat keahlian dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam arti sempit, seperti pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomis produktif dan program bantuan sosial langsung lainnya. Analisis Kebijakan Sosial mencakup keahlian merumuskan kebijakan sosial dan menganalisis implikasi-implikasi yang ditimbulkannya dalam konteks sistem sosial yang lebih luas secara holistik (Edi Suharto, 2005:107).

Masih menurut Edi Suharto (2005:107) Analisis Kebijakan Sosial merupakan seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politik pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan. Sebab urusan kesejahteraan sosial kerap

dihubungkan dengan urusan orang banyak, maka kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik.

Pendampingan sosial merupakan sebuah praktik-praktik pembangunan dan pengembangan masyarakat. Hal tersebut juga merupakan praktik-praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh pekerjaan seseorang. Pemberdayaan masyarakat akan memfokuskan diri pada masyarakat yang lemah dan kurang beruntung, seperti orang miskin, orang dengan kecacatan, dan komunitas adat terpencil. Sebab prinsip dalam pekerjaan sosial adalah untuk menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri, penentuan nasib sendiri, bekerja dengan masyarakat, dan bukan bekerja untuk masyarakat. (Edi Suharto, 2005: 57)

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek itu diakaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan dalam, kekuasaan untuk, kekuasaan atas, kekuasaan dengan. (Edi Suharto, 2005:64). Berikut penjelasan indikator tersebut:

1. Kebebasan mobilitas, yakni kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yakni kemampuan individu untuk membeli barang kebutuhan keluarga sehari-hari.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, yakni kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan, yakni mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama.
5. Kesadaran hukum dan politik, yakni mengetahui mengenai aturan-aturan hukum dan sebuah cara-cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
6. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, yakni ketika seorang individu sudah terlibat aktif dalam kampanye atau promosi politik serta terlibat dalam protes-protes.

2.3 Peran LSM dalam Pembangunan Masyarakat

Makin meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan, terutama ketika terjadi ketidakpuasan di lapisan masyarakat, mulai timbul gejala baru dalam demokrasi, yaitu partisipasi. Dalam sejarah barat, berpartisipasi itu timbul dari bawah, di kalangan masyarakat yang gelisah. Gejala itulah yang dilihat oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859) yang merupakan seorang pengamat sosial Prancis dalam kunjungannya ke Amerika pada tahun 30-an abad ke-19, yakni timbulnya perkumpulan dan perhimpunan sukarela (*voluntary association*) (Abdullah Taufik, 2006:27)

Selain menyelenggarakan kepentingan sendiri, dengan melakukan berbagai kegiatan inovatif, perkumpulan dan perhimpunan itu juga bertindak sebagai pengimbang kekuatan negara (*as a counter-weights to state power*). Ada tiga macam peran yang dijalankan oleh perkumpulan dan perhimpunan tersebut, yaitu: Pertama, menyaring dan menyiarkan pendapat dan rumusan kepentingan yang jika tidak dilakukan pasti tidak akan terdengar oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umum. Kedua, menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat daripada menggantungkan diri pada prakarsa negara. Ketiga, menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, menarik masyarakat untuk membentuk usaha bersama (*co operative ventures*) dan dengan demikian mencairkan sikap menyendiri (isolatif) serta membangkitkan tanggung jawab sosial yang lebih luas. (Abdullah Taufik, 2006: 55)

Perkumpulan dan asosiasi itulah yang kemudian menjadi “sokoguru masyarakat” (*civil society*). Dan apa yang disebut oleh Tocqueville itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dalam masyarakat barat dewasa ini disebut NGO (Non Government Organisasi). David Korten, seorang aktivis dan pengamat LSM memberikan gambaran perkembangan LSM. Ia membagi LSM menjadi 4 generasi berdasarkan strategi yang dipilihnya, antara lain:

1. Mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat. Pendekatannya, adalah dengan menderma, yaitu sebuah

usaha untuk memenuhi kebutuhan yang kurang dalam masyarakat. Generasi ini disebut sebagai “*relief and welfare*”.

2. Memusatkan perhatiannya pada upaya agar LSM dapat mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Peran LSM di sini bukan sebagai pelaku langsung, namun sebagai penggerak saja. Orientasi LSM ini ada pada proyek-proyek pengembangan masyarakat. Generasi ini disebut “*small cale*”.
3. Melihat keadaan di tingkat lokal sebagai kiblat dari masalah regional atau nasional. Masalah mikro dalam masyarakat tidak dipisahkan dengan masalah politik pembangunan nasional. Karena itu, penanggulangan dasar hanya dilihat sebagai kemungkinan adanya perubahan struktural. Generasi ini disebut sebagai “*sustainable system development*”.
4. Berusaha agar ada transformasi struktur dalam masyarakat dan disetiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Tujuan dasarnya adalah terciptanya dunia baru yang lebih baik. Karena itu dibutuhkan keterlibatan penduduk dunia. Ciri gerakan ini dimotori oleh gagasan dan bukan organisasi yang terstruktur. Generasi keempat disebut sebagai “*people movement*”.

Dalam penanggulangan masalah kesejahteraan, peran pemerintah masih terbatas dan belum mampu maksimal. Disinilah perlunya peran dan keterlibatan LSM/NGO dalam melaksanakan program dan pemberdayaan atau pembangunan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pula reposisi LSM/NGO di tengah masyarakat dalam bentuk:

1. LSM/NGO perlu memfasilitasi kembangnya kelembagaan rakyat yang kuat, dengan bersifat sektoral macam organisasi buruh, petani, masyarakat adat dll.
2. LSM/NGO perlu tampil ke publik luas, dalam arti semakin “*go public*” kemasyarakat, sehingga posisi dan perannya mampu lebih dirasakan oleh masyarakat, kerja sama dengan media ceta-elektronik seluas-luasnya.
3. LSM/NGO perlu semakin aktif dalam membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya. Seperti media massa,

mahasiswa, serikat buruh, petani, partai politik dengan tetap mengedepankan nilai dan sikap non-partisipan.

4. Perlunya penguatan LSM/NGO sebagai sebuah entitas dan komunitas yang spesifik di dalam masyarakat sipil, dan penguatan institusionalisasi LSM/NGO dalam hal eksistensi, sumber daya manusia, sarana, dana dan manajemen. LSM/NGO juga perlu lebih membuka diri untuk menjadi organisasi yang lebih berakar di masyarakat.
5. LSM/NGO juga dituntut untuk senantiasa membenahi kondisi internal dalam tubuh. Organisasinya, mengingat ini acap kali tidak diperhatikan dalam forum evaluasi oleh LSM/NGO yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Ralston mencatat bahwa LSM dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung swadaya yang dikembangkan, termasuk diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan. Setiap kebutuhan kelompok yang sudah diidentifikasi, misal keinginan dan tuntutan yang diinginkan diteliti serta dianalisis, mana yang bisa dipakai atau tidak. Kemudian didampingi untuk membuat strategi dalam tujuan pemenuhan kebutuhan kelompok tersebut.
2. Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut. Setelah diidentifikasi, lantas melakukan penggerakan dan penyamaan paradigma atau sudut pandang sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan.
3. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan lebih umum. Mendampingi kelompok untuk merumuskan kegiatan-kegiatan jangka panjang agar siap menghadapi masa depan. Tujuannya untuk pembangunan, baik SDM dan Organisasi menuju pemenuhan kebutuhan.
4. Menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan pedesaan. Artinya sumber daya yang ada di daerah pendampingan digerakkan untuk pembangunan daerah atau

lingkungan yang ditempati, atau menggerakkan sumber daya dari luar untuk kepentingan pembangunan wilayah pendampingan.

5. Peraturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Tiap LSM biasanya tidak menjalankan semua fungsi ini, setidaknya pada waktu yang sama. Mendampingi dalam pembuatan perencanaan dan juga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan selalu memberi rambu-rambu.

Lain halnya dengan Gaffar (2000:203) mengidentifikasi peranan kedalam tiga jenis bentuk, antara lain:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat akar rumput (grassroots) yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Secara garis besar, peran LSM dalam pencapaian kesejahteraan, yaitu peran peningkatan kesadaran (awareness raising), advokasi kebijakan (policy advocacy), pengembangan institusi (institution building), pengembangan kapasitas (capacity building). (Hetifah, 2003:31). Secara lebih dalam dan spesifik Hetifah mencoba menjelaskan peran tersebut dalam bentuk lingkup kegiatan-kegiatan, berikut penjelasannya:

1. Peningkatan kesadaran (awareness raising): memperkaya konsep-konsep pembangunan partisipatori dalam pengambilan keputusan publik, mendorong kesadaran eksekutif dan legislatif agar lebih membuka diri terhadap partisipasi warga, mendorong permintaan yang lebih besar untuk partisipasi dan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran warga tentang kebutuhan dan hak mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan penganggaran dan pengambilan keputusan publik.

2. Advokasi kebijakan (policy advocacy: memantau program/proyek pemerintah, mempengaruhi kebijakan dan strategi lembaga-lembaga donor internasional tentang partisipasi dan governance.
3. Pengembangan institusi (institution building): membangun strategic linkage dengan lembaga internasional.
4. Pengembangan kapasitas (capacity building): membangun sistem informasi dan komunikasi berbasis komunitas dengan media populer macam radio, serta membangun mailis tentang partisipasi dan community based development

Masih senada dengan penjelasan di atas, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menurut Bambang Ismawan (2002:14) bisa dilihat dari sifat-sifat yang melekat pada diri LSM yaitu berorientasikan pada pengembangan sosial, fleksibilitas, dan mudah menyusun program berdasarkan kebutuhan. Beberapa peranan LSM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran sebagai fasilitator, yaitu melalui para pembina yang tinggal ditengah-tengah kelompok menyertai proses perkembangan kelompok, membantu memecahkan masalah dan ikut menentukan alternatif pemecahan.
2. Sebagai pelatih dan pendidik, yakni mencarikan dan menyalurkan informasi dan pengalaman dari luar ke dalam kelompok melalui berbagai metode belajar-mengajar.
3. Pemupukan modal, yakni dengan mendorong upaya-upaya penghematan, menabung, dan usaha produktif.
4. Menyelenggarakan proyek-proyek stimulan, yakni dengan menarik keluar kelompok tersebut dari isolasi rumah keongnya yaitu dengan menyelenggarakan proyek-proyek stimulan. Dan sebenarnya yang paling penting dari peranan LSM adalah menjadi pendidik kemandirian.

2.4 Buruh

2.4.1 Pengertian Buruh

Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapat baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun, dalam kultur Indonesia, buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasar, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot, melainkan otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi, keempat kata tersebut sama apabila merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Buruh atau tenaga kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab I pasal 1 ayat 2 yaitu, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari sebuah sistem pekerjaan, artinya kesejahteraan mereka semestinya sudah diberi perhatian secara khusus.

Sedangkan menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani menyatakan bahwa, tenaga kerja atau buruh adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Berlanjut pengertian menurut Alam. S yakni, tenaga kerja atau buruh adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, sedang negara maju melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah, dan mengurus rumah tangga. (Membina kompetensi ekonomi, 2007: 19)

Di Sumberwadung, buruh ada dibawah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumberwadung tergolong buruh yang hina, kasar, dan lemah. Karena mereka mendapat perlakuan yang bisa dibilang sangat tidak wajar. Dengan tidak diberinya upah secara benar dan sesuai, kemudian tidak adanya jaminan kerja dari pihak perusahaan, serta jam operasional kerja yang tidak manusiawi.

2.4.2 Buruh Perkebunan

Sedangkan buruh perkebunan adalah seorang yang bergerak di bidang perkebunan, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (tembakau, kopi, kakao, karet, dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya untuk orang lain. (Husodo SY, 2004)

Menurut UU no. 18 tahun 2004 menyatakan bahwa, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tana dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen. Untuk kemudian mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran. Yang ditanam biasanya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga lebih. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung volume komoditas yang dihasilkan. Namun, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkan.

2.4.3 Jenis-Jenis Buruh

Sebagai orang yang bekerja untuk orang lain, yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, buruh mendapatkan upah dengan beragam cara, dari harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Dan kesemuanya itu sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan menurut undang-undang pokok ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa, buruh dibagi menjadi beberapa macam jenis, antara lain:

1. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja
2. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.

3. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu, misal buruh tebang tebu.
4. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik-pabrik.
5. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
6. Buruh tani atau perkebunan, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.
7. Buruh terampil, buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu
8. Buruh terlatih, buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.

Buruh yang terdapat di Sumberwadung, jika dibedakan dari lokasi kerja dan jenis pekerjaannya, maka akan terbagi sebagai berikut: Pertama, pengolahan getah karet di pabrik. Kedua, buruh sadap karet di kebun. Ketiga, buruh musiman kopi. Biasanya kalo buruh musiman kopi ini, hanya dipakai saat musim penanaman dan pemanenan. Pula jika pada waktu tertentu ada perawatan.

Sedangkan jika ditilik dari status sebagai pekerja, maka akan terbagi menjadi dua, yakni buruh tetap dan buruh lepas. Buruh tetap ini, maka statusnya seperti pekerja yang sudah mempunyai posisi tetap. Dan tidak semerta-merta bisa mencopot atau memberhentikannya. Sedang buruh lepas ini merupakan buruh yang sewaktu-waktu bisa dicopot atau diberhentikan sementara, dan bisa dipakai kembali ketika dibutuhkan.

Untuk sistem upah yang biasa diterima oleh buruh, terbagi menjadi empat, yakni buruh harian, lembur, borongan, dan musiman. Artinya, jika harian maka gaji akan diberikan sebanyak berapa hari dia kerja, dan tidak ditarget secara paksa. Sedang lembur, besaran gaji dihitung dari seberapa banyak telah melakuak lembur di PDP. Kemudian borongan, ketika ia sudah merampungkan kerjaan dengan taget yang telah ditentukan, maka ia akan mendapat gaji, dan tidak berbatas waktu. Dan musiman, ini sistem pengupahannya menghitung harian, namun biasanya hanya memakai buruh pada musim tertentu.

2.4.4 Stratifikasi dan Karakteristik Buruh

Menurut Nur Sayyid Kristeva (2015:523) mengatakan bahwa buruh dapat digolongkan ke dalam kaum proletariat, sebuah istilah untuk mengidentifikasi

kelas rendah. Proletariat merupakan masyarakat kelas kedua setelah kelas kapitalis yang hidup dari gaji hasil kerjanya. Di Indonesia, terutama di Jawa era kolonial, masyarakat proletar dipegang oleh kaum pribumi. Biasanya, mereka adalah orang yang paling terseksplorasi dalam era kolonial Hindia Belanda. Menurut peraturan yang dibuat pemerintah kolonial, mereka benar-benar dikurangi haknya sampai batas minimal.

Dalam pemikiran Karl Marx, ini adalah kelas kedua dalam stratifikasi sosial yang diciptakan. Proletar adalah kelas yang menerima gaji dari kelas pertama, yakni majikan atau biasa disebut borjuis. Proletar bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sedangkan borjuis merupakan kelas majikan yang bekerja dengan mencari untung atau laba. Kelas proletar sering menjadi target eksploitasi para majikan yang berorientasi pada kapitalis ini. Untuk itu, mereka sering diperas tenaga, serta diberi upah rendah guna meraup untung yang sebesar-besarnya.

Para proletar ingin hidup tenang, maka dia yang hidup untuk bekerja akan mengalami alienasi atau keterasingan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga menumpang pada kaum pemodal untuk menciptakan barang dengan nilai lebih. Nilai lebih ini tercipta dari rumusan nilai barang dikurangi nilai seluruh hasil produksi dan menciptakan untung. Oleh karena itu, proletar yang kehilangan kebebasannya akan memotes tirani kapitalis tersebut dengan demonstrasi dan hal-hal lain yang diperlukan.

Namun, para kapitalis tersebut akan menolaknya. Mereka di pihak pemerintah karena merekalah yang memberi kekayaan negara, terutama di negara-negara berideologi liberalisme. Jika pemerintah tidak mengimbangi hak-hak kaum proletar dan mengejar untung dari para majikan tersebut, sebuah gerakan anarkisme pun terjadi dan mungkin akan menciptakan revolusi. Pasca revolusi maka terciptalah perubahan dari kapitalisme yang mencekik menjadi negara sosialis yang mendukung rakyat atau kaum proletar.

Dalam suatu korporasi, terdapat perbedaan yang dipandang sebagai unit sosial. Karena itu, sebagaimana keluarga atau masyarakat, ia memiliki struktur

sosial. Para anggotanya dapat dibedakan secara vertikal (stratifikasi) dan secara horizontal (diferensiasi), diantaranya:

1. Secara stratifikasi atau vertikal terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain;
 - a. Industrialis atau pengusaha pada puncak stratifikasi. Kemudian pengusaha dibagi ke dalam sub kelompok yakni, pemilik sekaligus pengusaha (manajemen) dan pemilik tanpa jabatan struktural dalam perusahaan.
 - b. Manajemen, pengendali utama kegiatan pabrik sehari-hari yang kekuasaannya bersumber pada profesional atau keprofesionalan dan kepemilikan. Manajemen dibagi menjadi tiga sub kelompok, yakni manajemen (*top management*), manajemen menengah (*middle management*), staf pendukung (*supporting staff*). Ada seorang Manajer, seorang yang bisa mengangkat mandor. Untuk kemudian bertugas mengawasi dan/atau mengoperasikan mesin serta pekerjaan pada umumnya.
 - c. Buruh, tidak memiliki modal, alat produksi, keterampilan otak yang memadai. Buruh dapat dikelompokkan ke dalam sub kelompok, yakni tingkat pertama, kepala regu, buruh massal.
2. Secara horizontal, sebenarnya setiap buruh massal berasal dari kedudukan yang sama. Hal yang membedakan adalah spesifikasi bidang tugas dan/atau divisi asal buruh yang ada di pabrik. Ada beberapa pengecualian kecil, yakni dalam beberapa kasus terjadi hubungan buruh yang bersifat silang. Selain pemimpin formal dalam pabrik, kadang-kadang ada pemimpin informal serta kadang-kadang ada juga peraturan nonformal yang disepakati bersama. Pelanggaran terhadap kesepakatan non-formalakan mendapat sanksi sosial dari buruh.

Mengadopsi istilah dari Nurhasim (2015) dalam menganalisa struktur sosial masyarakat pekerbunan Sumberwadung, dijelaskan bahwa stratifikasi yang paling tepat untuk dijadikan bahan untuk pemecahan masalah dengan pihak

perusahaan adalah menggunakan stratifikasi vertikal. Yang membedakan tiga kelompok, diantaranya, atas-tengah-bawah.

Di Sumberwadung, posisi yang berada pada stratifikasi atas ditempati oleh pimpinan unit kerja perusahaan PDP Sumberwadung dan jajaran atas unit PDP Sumberwadung. Sedangkan strata menengah ditempati oleh tokoh-tokoh lokal, seperti Kiyai (pemilik pondok pesantren), Kepala Dusun dan Kepala Desa. Lalu pada kelas bawah ditempati oleh para buruh perkebunan.

2.4.5 Kesejahteraan Hidup Buruh

Masa kolonialisme sangat mempengaruhi sejarah buruh lepas dan ketenagaakerjaan di Indonesia. Meski awalnya buruh lepas atau kontrak berasal dari warga lokal, namun tidak sedikit yang datang dari luar daerah. Hal tersebut terjadi karena luasnya lahan pada suatu daerah, karena mereka –yang menjadi buruh—mayoritas tidak mempunyai lahan untuk digarap sendiri. Kuli kontrak ini dipekerjakan dengan upah yang murah, sesuai target yang ditentukan sepihak oleh perkebunan. Yang kemudian mengakibatkan kehidupan kuli berada dalam situasi miskin dan menderita (Nainggolan:2012).

Pasca kemerdekaan kondisi buruh perkebunan mulai mendapat kesejahteraan. Namun, perbaikan kondisi ini bukan berasal dari pemerintah, melainkan akibat dari perjuangan dan desakan buruh dengan organisasi luar. Pada waktu itu, perjuangan mereka mendapatkan respon dari pemerintah, yaitu pemerintah menerapkan hubungan kerja yang berbasis kesejahteraan kolektif. Kesejahteraan tersebut mencakup hidup yang layak dan jaminan atas pekerjaan, dan fasilitas yang memadai. (Nainggolan:2012).

Realitas buruh lepas di perkebunan saat ini tidak jauh berbeda dengan masa kolonial. Masih menurut Nainggolan (2012) mengungkapkan bahwa, pola-pola penindasan dan kontrol yang berlangsung pada masa kolonial masih berlangsung sampai saat ini. Pada masa kolonial, rekrutmen tenaga kerja dilakukan berdasarkan migrasi-politik etis, pemborongan pekerjaan (*anemer*), dan kontrak tertutup. Namun, saat ini istilah tersebut dikenal dengan istilah *outsourcing*. Dalam perekrutan tenaga kerja, umumnya buruh kontrak didapat

melalui asisten, mandor kebun, kepala desa, maupun tokoh masyarakat. Selain itu, pihak perkebunan juga akan memberikan pengumuman ketika mereka membutuhkan tenaga kerja baru.

Menurut Andri Novius (2009:01) mengatakan bahwa, permasalahan kesejahteraan terutama untuk para buruh/karyawan tidak bisa dipisahkan dengan budaya organisasi. Karena dalam konsep budaya organisasi, utamanya dari unsur budaya terfokus pada respons terhadap permasalahan yang menyangkut tentang bentuk adaptasi manusia, dan suatu cara-cara yang digunakan sejumlah populasi untuk mengorganisasikan kehidupannya di bumi.

Budaya organisasi dengan kesejahteraan hidup buruh sangat berkaitan, sentot (2002) membedakan beberapa ciri-ciri dari budaya organisasi, antara lain: Pertama, inisiatif individu. Kedua, toleransi terhadap tindakan beresiko. Ketiga, arah organisasi yang jelas sarannya. Keempat, integrasi. Kelima, dukungan dari manajemen. Keenam, kontrol. Ketujuh, identitas. Kedelapan, sistem imbalan. Kesembilan, toleransi terhadap konflik. Kesepuluh, pola-pola komunikasi.

Budaya dalam organisasi dirasakan sebagai kekuatan inti yang dapat mempengaruhi perilaku anggota serta dapat digerakkan dan diatur dengan baik sehingga kekuatan organisasi dapat dirasakan bersama oleh seluruh komponen dalam organisasi, bahkan juga dapat dirasakan oleh lingkungan di sekitar organisasi. Bagai sebuah misteri, kesejahteraan buruh musti segera dicari pemecahannya.

Masih menurut Sentot (2002), dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tanggal 21 Maret pasal 1 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Namun, peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena perusahaan yang memiliki kepentingan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya sesuai keinginan pemilik (prinsipil). Hingga kemudian buruh yang seharusnya mendapat upah yang sesuai dengan aturan undang-undang, akhirnya tidak mendapat yang sesuai. Kepiluan itu harus diterima oleh buruh, sebagai akibat dari budaya yang melekat dalam organisasi itu. Sehingga penerapan peraturan pemerintah hanya akan menjadi suatu permasalahan yang tak kunjung dapat dicari jalan keluarnya. Begitupun dengan buruh yang ada di PDP Sumberwadung, mereka merasakan imbas tersebut. Dan berakibat, gaji yang didapat kurang memadai. Jauh dari UMR Jember.

Besarnya tingkatan upah untuk buruh sangat tergantung pada kemampuan dan kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Namun, berdasar pada prinsip ekonomi, dengan *cost* yang minimal diupayakan untuk memperoleh hasil maksimal. Hal ini juga berlaku pada buruh yang psosisnya paling lemah. Menurut Anwar Ma'ruf, selaku koordinator aliansi menggugat (ABM) dalam www.rumahkiri.net, kita mendengar dlogan 'ramah investasi' yang ternyata mempunyai arti yakni, menerapkan sistem kontrak dan *outsourcing*.

Sistem *outsorching* akab berujung pada pembebasan pengusaha dari kehausan membayar upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kerangka kapitalisme, dasar penetapan upah tetaplah sesuai proses jual-beli antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian, tingkatan upah haruslah sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk menghadirkan kemampuan kerja seorang buruh yang sehat secara fisik dan mental.

Unsur hukum pengupahan yang berlaku di Indonesia tertuang dalam undang-undang nomor 14 tahun 1969 bab I pasal 3 bahwa, "tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan." Untuk mengerahui lebih jelas tentang upah ada beberapa teori paduan menurut www.dikmenu.go.id, yaitu:

1. Upah Tenaga Kerja, pemberian upah kepada tenga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/jasa dari para

produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada:

- a. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
- b. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR)
- c. Produktivitas marginal tenaga kerja.
- d. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
- e. Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu, maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Upah nominal, sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
 - b. Upah riil, kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.
2. Teori upah tenaga kerja, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam hal upah dan pembentukan harga upah tenaga kerja, berikut akan dikemukakan beberapa teori yang menerangkan tentang latar belakang terbentuknya harga upah tenaga kerja:
- a. Teori upah wajar (alami) dari David Ricardo, yang menerangkan bahwa upah sesuai kodrat, yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Sedangkan di pasar akan terdapat upah menurut pasar, upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Namun, upah pasar akan berubah di

sekitar upah menurut kodrat. Sedangkan menurut ahli ekonomi, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

- b. Teori upah besi, dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle, penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh para produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut, maka teori ini dikenal dengan istilah “teori upah besi”. Untuk itulah, Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja.
- c. Teori dana upah, dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini, tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu, jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun. Karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja.
- d. Teori upah etika, menurut kaum utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat ideal) tindakan oara pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, adalah suatu tindakan yang tidak “etis”. Oleh karena itu, sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya juga harus memberikan tunjangan keluarga.

Setiap negara menganut sistem pengupahan yang disesuaikan dengan falsafah negaranya masing-masing. Di Indonesia, pemerintah memberlakukan sistem upah yang layak, secara yuridis menurut Undang-Undang Tenaga Kerja termasuk semua peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara operasional dijabarkan dalam azas-azas Hubungan Industrial Pancasila (HIP), dengan tujuan untuk mencapai azas mufakat, azas usaha bersama,

kekeluargaan, azas demokrasi, azas adil dan merata dan kesimbangan. Sistem pengupahan ini dapat dijabarkan dalam pengertian, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan setiap pekerjaan yang sama nilaunya, berhak atas upah yang sama, yaitu upah yang menjamin kehidupannya beserta keluarga. Upah juga harus ditetapkan sesuai dengan sifat, bakat dan kecakapan buruh (pekerja) masing-masing.
2. Pengupahan yang layak bagi kemanusiaan tidak semata-mata diserahkan kepada rasa keluruhan (etika) dari pengusaha (majikan) saja, akan tetapi harus dijamin oleh pengusaha (pemerintah) agar dilaksanakan oleh pengusaha (majikan) sebagai kewajiban sosial.
3. Buruh (pekerja) juga harus mempunyai kewajiban sosial di bidang pengupahan.

Dalam Jurnal Grendri Hendrasto (2005:10), kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja. Kenyamanan dan ketentraman dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemilik modal merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diterima pekerja.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Masih dalam Jurnal Grendri Hendastro (2005:10) mengatakan bahwa, selain upah terhadap buruh, kesejahteraan buruh meliputi jaminan tenaga kerja. Hal tersebut merujuk pada UU ketenagakerjaan no. 25 tahun 1997 tentang kesejahteraan buruh meliputi: upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam jurnal Grendrei Hendrasto (2005:13-15), menyatakan bahwa, untuk meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan dengan tiga cara, diantaranya: Pertama, dengan memupuk kesadaran kaum buruh. Hingga

kemudian bisa membuat gerakan untuk menuntut kesejahteraan. Kedua, memupuk kesadaran pemilik modal, yakni dengan merubah cara pandang terhadap buruh. Buruh bukan lagi komoditas, faktor produksi, tetapi buruh merupakan *stakholder* juga bagi perusahaan, sehingga untuk mengurangi beban produksi tidak lagi mengurangi kesejahteraan buruh atau pemutusan hubungan kerja, tetapi dengan efisiensi. Keiga, membangun kesadaran pemerintah, dengan menaikkan UMR.

Memang sulit untuk sekelas Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumberwadung untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua pekerja, apalagi buruh. Karena perusahaan juga akan memikirkan perputaran uang yang ada di perusahaan. Namun, jika ingin menilik kesejahteraan buruh yang ada di Sumberwadung. Maka, ketika buruh itu sudah bekerja sesuai dengan jam kerja, pula besaran gaji yang diterima sesuai dengan aturan. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa kesejahteraan buruh bisa didapat.

2.5 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

N o	Nama/T ahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Adzkiya k / 2015	Perlawanan Terselubung Buruh Perkebunan: Studi Kasus Perlawanan Buruh PDP Kabupaten Jember	Perlawanan terselubung yang dilakukan oleh buruh perkebunan menunjukkan sifatnya yang terbatas, dilakukan secara kecil- kecilan dan	Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada model perlawanan yang dilakukan oleh buruh PDP Sumberwadu ng	Pada penelitian Wiwik Himawati, memfokuskan pada perlawanan terselubung buruh PDP Sumberwadung . Sedangkan pada penelitian ini,

			individual, tidak membutuhkan koordinasi dan strategi aksi.		memfokuskan diri pada bentuk dan hasil peran LSM SKETSA dalam Pendampingan Sosial, agar gerakan perlawan yang dilakukan oleh buruh terorganisir.
2	Toni Andrianto / 2014	Kondisi Ekonomi Buruh Lepas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Pendidikan	Kondisi ekonomi buruh harian lepas dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan anak masih sangat rendah, hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh guna memenuhi kebutuhan pangan dan	Sama-sama berbicara tentang kondisi ekonomi, yang kemudian menjadi latar belakang buruh di PDP Sumberwadu ng melakukan gerakan untuk melawan.	Perbedaan dengan penelitian Toni ini, terdapat pada fokus. Jika toni memfokuskan pada pendeskripsian kondisi ekonomi buruh, namun peneliti lebih mendeskripsikan bentuk peran dan hasil dari pendampingan sosial yang dilakukan oleh LSM SKETSA.

pendidikan
anak. Pula
strategi
bertahan hidup
buruh harian
lepas yang
bekerja di
perkebunan
kopi PDP
Sumberwadun
g, dengan
banyak cara.

3	Aprilia Maharani / 2015	Bentuk Eksplorasi dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas pada Perusahaan Daerah Perkebunan di PDP Sumber Wadung Kabupaten Jember	Buruh lepas di Sumber Wadung mengalami eksploitasi oleh perusahaan perkebunan. Eksplorasi tersebut antara lain penyimpanan prosedur kerja, merampas hak-hak buruh, mengurangi standar pengupahan, mengeksplorasi tenaga mereka, serta	Sama-sama meneliti tentang buruh perkebunan.	Perbedaannya terdapat pada tidak adanya konsep peran LSM. Dalam penelitian Aprilia, hanya memfokuskan kasjian pada bentuk eksploitasi saja.
---	----------------------------	---	---	---	---

melakukan
manipulasi.

2.6 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2010), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis, perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.

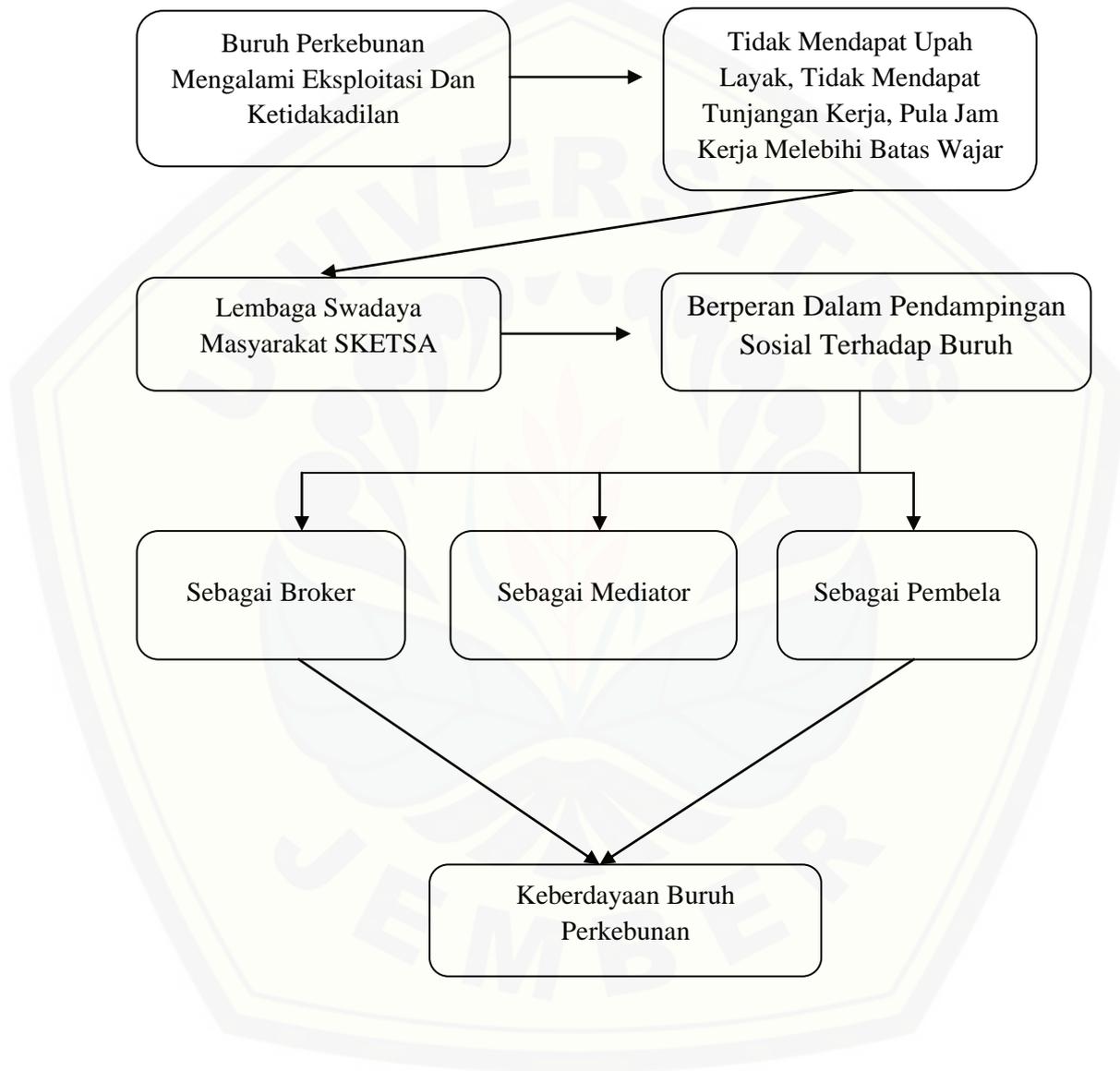
Apabila dalam penelitian ada variabel meoderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian. Kriteria utama agar suatu kerangka berpikir bisa meyakinkan sesama ilmuwan, adalah alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Berdasarkan teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merangka pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir, diharapkan dapat memberi jalan bagi proses menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Peneliti menarik permasalahan buruh yang masih hidup di garis kemiskinan. Kemudian nasib mereka kerap tidak diperhatikan oleh perusahaan perkebunan, mendapat ketidakadilan, dan eksploitasi. Sehingga masih belum memiliki kesejahteraan.

Lantas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SKeTSa melakukan pendampingan pada buruh tersebut. Awalnya, LSM SKeTSa hanya memberikan seruan-seruan untuk mencerahkan buruh, macam pendidikan dan pemantapan mental. Akhirnya, ada beberapa golongan buruh yang protes terhadap pimpinan perusahaan untuk menuntut pemberian gaji yang layak, namun langkah tersebut berbuntut panjang.

Buruh yang melakukan aksi protes tersebut di PHK dari perusahaan, yang mengakibatkan kesejahteraan mereka terganggu. Maka dari itu, mau tidak mau, LSM SKeTSa turun tangan untuk mendampingi buruh dalam menelaah, menganalisis, memecahkan persoalan yang terjadi. Kemudian, terbentuklah Serikat Buruh untuk Kemakmuran yang disingkat menjadi SERBUK. Dari serikat buruh tersebut, akhirnya, permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Buruh yang dipecah pun bisa bekerja kembali. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu, Desa Sumber Wadung Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan Lembaga Swadaya Masyarakat SKeTSa

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Definisi metode menurut Taliziduhu Ndraha (1997:22) merupakan jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang, yang dapat terjadi dan yang akan terjadi.

Sedangkan menurut Soekanto (2009:48), metode penelitian merupakan suatu cara untuk menganalisa, menguji kebenaran, dan menguji keabsahan data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di mana menggunakan bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak. Walaupun hal tersebut terdapat di dalam masyarakat. Meleong (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Bila mengacu pada pengertian yang disampaikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016:59), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedang, jenis kuantitatif, yang juga kerap digunakan apabila tidak memakai kualitatif, adalah musti ditandi dengan penyajian data secara numerik. Selaiknya penelitian, data, fakta, serta informasi, didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bogdan dan Taylor (dalam Sihite, 2007:95) menjelaskan bahwa, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami individu secara personal.

Melalui metode ini, peneliti dapat memahami lebih mendalam apa yang dialami individu dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan mendapat penjelasan yang valid mengenai Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SKETSA dalam Pendampingan Sosial Buruh Perkebunan PDP Sumberwadung. Menurut Sa'ud (dalam Ghony dan Alamshur, 2012:13-14) penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data untuk diinterpretasi.

Menurut Norman dan Yvonna (2009:6), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Hal ini berarti dalam penelitian kualitatif lebih menekankan sifat realita yang terbangun secara rasional, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti, dan dinamika situasilah yang kemudian membentuk penyelidikan. Menurut Norman dan Yvonna (2009:6):

“Para peneliti kualitatif mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menitikberatkan pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara bermacam-macam variabel, buka prosesnya. Penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai.”

Metode kualitatif mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang lebih mengutamakan penghayatan, sehingga berusaha memahami dan menginterpretasi makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Di dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas

Jember (2016:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali suatu gejala atau fenomena sosial yang memiliki karakteristik tertentu, untuk disampaikan pada khalayak umum sebagai gambaran tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Peneliti berusaha mengungkapkan keadaan tersebut secara natural, penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Moleong (2004:11), menjelaskan bahwa dalam penelitian eksplorasi data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dimana menurut Idrus (2009:24) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.

Terkait dengan jenis penelitian, penelitian ini merupakan deskriptif seseuai dengan tujuan penelitian. Sehingga secara utuh, penelitian ini disebut penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SKETSA dalam Pendampingan Sosial Buruh Perkebunan di Sumberwadung, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Menurut buku pedoman karya ilmiah (2016:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di sekretariat LSM SKETSA. Peneliti juga menetapkan beberapa lokasi untuk memperoleh informasi terkait penelitian ini. Penelitian yang dilakukan di beberapa tempat ini, bertujuan untuk memahami dan menggali peran LSM SKETSA lebih dalam lagi.

Pada penelitian ini, peneliti menentukan Desa Sumber Wadung, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, sebagai tempat atau lokasi penelitian dan secara lebih mendalam dilakukan di Perumahan Taman Gading no. 1 (sekretariat LSM SKETSA). Dipilih sebagai lokasi penelitian dengan sekian pertimbangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Belum adanya penelitian di Kabupaten Jember yang mengkaji dan membahas terkait jalannya pembahasan Peran LSM SKETSA dalam Pendampingan Sosial kepada buruh perkebunan di PDP Sumberwadung.
- b. Dari beberapa LSM yang masih aktif terjun pada buruh di Sumberwadung, hanya LSM SKETSA yang masih aktif.
- c. Karena permasalahan buruh seakan tidak pernah habis, pula setiap tahun bermuculan orang-orang yang melakukan aksi demonstrasi mengatasnamakan buruh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai komponen pokok yang harus terpenuhi untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk memperoleh hasil yang baik, tentunya harus ditunjang oleh data akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Data tersebut digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Menurut buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (201:23), mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data penelitian. Secara lebih spesifik, Bungin (2011:23) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, sebagian besar menggunakan data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan berupa cerita pendek. Data kualitatif bersifat subyektif, sehingga peneliti harus berusaha menghindari sikap subyektif yang dapat mengaburkan obyektivitas data penelitian (Pratiwi, 2013:50). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua jenis data tersebut. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung dan wawancara kepada informan terkait Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pendampingan Sosial Buruh Perkebunan di PDP Sumberwadung, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pendampingan sosial tersebut. Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi; catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen serta pendukung lainnya macam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, notulensi konsultasi advokasi yang dilakukan oleh pihak manajemen korporasi, notulensi *hearing* yang dilakukan, pula data-data lain yang menunjang.

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:24), merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Kualitas data tergantung kepada kualitas alat pengukur atau alat pengambil data serta kualifikasi orang yang mengambil data. Data atau informasi dapat diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Peneliti harus menerima menurut apa adanya. Dalam penelitian ini, teknik dan alat perolehan data dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Sugiyono (2011:233), mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semistruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas. Namun, tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Maksud dilakukannya wawancara ini, adalah untuk secara langsung dari kata-kata dan tindakan informan, kemudian data dan hasil wawancara tersebut dicatat. Menurut Esterberg, jenis wawancara ada tiga yakni sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang dibutuhkan dan akan diperoleh. Sebelum mengumpulkan data, peneliti telah menyiapkan *instrument* penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2. Wawancara Semi Terstruktur (*Semistructured Interview*)

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dengan tujuan dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan yang diwawancarai dapat mengeluarkan pendapat serta ide-ide secara terbuka.

3. Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Dengan tujuan untuk memperoleh data secara lebih terbuka dengan memintai pendapat dan ide dari pihak yang diwawancarai. Selain itu, agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Peneliti sebelum melakukan wawancara akan mencatat pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan diajukan saat wawancara, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut akan

berkembang selama proses wawancara berlangsung di lapangan atau lokasi penelitian.

a. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Idrus (2009) pada jenis penelitian ini, peneliti akan mendatangi kepada sumber data terkait dengan maksud dan tujuan dalam rangka melakukan penelitian. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pada suatu saat peneliti juga melakukan observasi yang tersamarkan untuk menghindari proses penyimpangan data yang dilakuka secara rahasia oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan observasi ini adalah kamera atau media rekam lainnya untuk mendokumentasikan hasil observasi peneliti.

Observasi terdiri dari beberapa jenis yang memiliki kriteria kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang dipilih biasanya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Menurut Moleong (2016:24-277), jenis-jenis observasi terdiri dari:

1. Observasi Partisipatif.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dengan obyek yang sedang diteliti. Sehingga data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, sesuai dengan fakta yang ada, dan peneliti dapat mengetahui tingkat makna dan setiap perilaku yang nampak.

2. Observasi Terus Terang atau Tersamar.

Jenis observasi yang ketika peneliti melakukan pengamatan menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa, peneliti sedang melakukan penelitian. Namun, dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi. Hal ini, bertujuan menghindari adanya data yang sedang dicari merupakan data yang sedang disarhasiakan dan jika peneliti terus terang, kemungkinan besar tidak akan memperoleh data yang diinginkan.

3. Observasi Tak Berstruktur.

Dalam sebuah penelitian kualitatif, jenis observasi ini biasanya belum dipersiapkan secara sistematis apa yang akan diobservasi. Karena fokus penelitian ini masih belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama proses observasi sedang berlangsung. Pengamatan yang dilakukan peneliti tidak menggunakan rambu-rambu pengamatan.

Penelitian ini menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar. Memilih observasi ini, karena berhubungan dengan lokasi penelitian. Salah satu lokasi yang akan diteliti adalah lembaga. Dan tidak memungkinkan untuk memperoleh data secara tertulis maupun dokumen-dokumen penting, pula identitas peneliti juga dirahasiakan. Sedangkan penggunaan observasi tersamarkan dilakukan untuk menghindari penyembunyian data yang dirahasiakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka peneliti menggunakan model observasi secara tersamarkan atau terus terang.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah UU Ketenagakerjaan no. 23 Tahun 2003, pedoman kerja buruh di perkebunan yang notabene dimiliki oleh PT (perseroan terbatas). Selain itu, dokumentasi berupa foto, catatan, dan hasil rekaman proses observasi dan wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting pendukung penelitian.

Dengan alasan sebagai kelengkapan dan kesesuaian data, maka peneliti menggunakan dokumentasi. Pemilihan metode ini, karena hal tersebut akan menjadi bukti penegas dalam penelitian.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan dalam metode kualitatif terus berkembang secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap jenuh (hasil tetap). Alat pengumpul data

atau instrumen dalam metode ini adalah peneliti sendiri, oleh karena itu peneliti menjadi instrumen kunci, sehingga ketika mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Namun, yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Menurut Irawan (2006:17), *Purposive* adalah *Sample* yang sengaja dipilih oleh peneliti karena *Sample* ini dianggap memiliki ciri-ciri yang dapat memperkaya peneliti. Menurut buku pedoman karya ilmiah Universitas Jember (2010:23). Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:221), informan peneliti sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi, yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif, bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- d. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Pada bagian ini, penulis menggambarkan informan yang dijadikan sasaran penelitian. Informan merupakan orang-orang yang menjadi media penelitian untuk memberikan informasi atau situasi, kondisi latar dan data penelitian. Informan dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua, yaitu informan pokok dan informan tambahan. Informan pokok merupakan informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi serta terlibat langsung dengan interaksi sosial yang sedang diteliti, sedangkan informan tambahan, merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksinya dan sifatnya sebagai data tambahan untuk mengonfirmasi informan pokok.

3.5.1 Informan Pokok

Informan pokok ((ed) Suyanto dan Sutinah, 2006:172), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi serta terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan pokok dalam penelitian ini adalah Pembina LSM SKeTSA, Ketua LSM SKeTSA, Pengurus Harian LSM SKeTSA. Beberapa informan tersebut merupakan informan yang terlibat secara langsung dalam program dan ditetapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti secara obyektif. Pula mengetahui secara detail pera LSM SKeTSA dalam Advokasi Sosial Buruh Perkebunan di daerah Sumber Wadung Kecamatan Silo Kabupaten Jember. berikut deskripsinya:

1. Informan ST

Informan ST merupakan Pembina SKeTSA. Dari informan ini, peneliti mendapat informasi tentang arahnya saat LSM SKeTSA melakukan advokasi di Sumberwadung. Lalu tahap seperti apa yang dilakukan untuk advokasi buruh sampai dikatakan sejahtera atau berhasil. Di lembaga SKeTSA, pembina sering disebut sebagai staf ahli. Ada 3 orang yang membina SKeTSA. Namun, hanya diambil satu orang sebagai informan. Di umur 57, beliau masih aktif terjun membina lembaga dalam advokasi sampai sekarang. Selain beraktifitas dalam pembinaan lembaga, beliau juga mengajar di lembaga pendidikan yang ada di Jember.

Sehingga dalam menjelaskan advokasi yang pernah dilakukan, perkataan beliau sangat mudah dicerna. Informan “ST” beralamat di Perum Taman Kampus Jember, memudahkan peneliti untuk bertemu dengannya. Beliaulah yang memberi masukan dan saran dalam advokasi yang dilakukan di Sumber Wadung.

2. Informan GB

Informan GB merupakan Ketua SKeTSA. Dari informan ini, peneliti mendapat informasi dan data tentang bagaimana SKeTSA saat melakukan advokasi dulu. Karena GB adalah orang yang terlibat langsung, dan bersinggungan langsung dengan daerah serta orang yang diadvokasi. Informan “GB” ini berusia 47 tahun, beliau masih mempunyai semangat

membara untuk mengentaskan permasalahan yang ada di wilayah binaan, salah satunya Sumber Wadung. Beliau pula yang memimpin komando strategi dalam advokasi buruh di sana, hingga sampai sekarang, beliau diibaratkan pahlawan tanpa tanda jasa.

Selain beraktifitas dalam lembaga SKeTSA, beliau juga bekerja di lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Informan “GB” beralamat di Perum Taman Gading Jember. Beliaulah yang pernah bersihteang dengan direksi PDP Sumber Wadung.

3. Informan AW

Informan AW merupakan pengurus harian SKeTSA divisi perburuan. Dari informan ini, peneliti akan mendapat informasi serta data mengenai cara pandang SKeTSA mengenai perburuan. Bagaimana situasi, kondisi, jangkauan, dan pandangan yang ada pada buruh. Pula bagaimana cara menyikapinya. Informan “AW”, seorang lulusan dari jurusan psikologi, membuat ia merasa terpanggil jiwanya untuk mengadvokasi buruh di Sumber Wadung yang mendapat tekanan oleh perusahaan. Beliau berumur 39 tahun, dan beralamat di Desa Semboro, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Ia merupakan pengurus dibagian perburuan, ia pula yang kerap tinggal selama beberapa hari di Sumber Wadung hanya untuk memastikan kondisi buruh yang ada. Pekerjaan sampingannya adalah menjadi PKH di Kecamatan Tanggul.

4. Informan ZM

Informan ZM ini merupakan pengurus harian SKeTSA divisi kebijakan. Dari informan ini, peneliti bisa memperoleh informasi serta data bagaimana SKeTSA melihat permasalahan yang ada di Sumberwadung dengan menggunakan perspektif kebijakan. Dan pula bagaimana cara mengatasinya. Informan “ZM”, merupakan laki-laki berumur 34 tahun yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di lembaga pendidikan Jember. Ia merupakan pengurus bidang kebijakan. Ia akan banyak sedikit berbicara tentang kebijakan buruh yang ada di sana. Ia beralamat di Sekretariat LSM SKeTSA, Perum Taman Gading, blok AG-01

Jember. Hingga sekarang, ia masih aktif terjun bersama pengurus yang lain dalam advokasi buruh di Sumber Wadung.

3.5.2 Informan Tambahan

Informan tambahan ((ed) Suyanto dan Sutinah, 2006:172), yaitu mereka yang dapat memberika informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan ini mempunyai kriterisia, diantaranya: Pertama, mengetahui pengetahuan mengenai obyek penelitian. Kedua, bertempat tinggal di lokasi penelitian. Ketiga, dapat memberikan keterangan sebagai pihak lain, disamping yang tidak ditunjuk sebagai informan pokok. Keempat, dapat memberikan keterangan yang tidak dikuasai oleh informan pokok. Berikut deskripsi informan tambahan pada penelitian ini:

1. Informan SI

Informan ini merupakan buruh perkebunan di PDP Sumberwadung. meski hanya lulusan SD, beliau termasuk orang yang paling berani saat melakukan aksi atau gerakan saat buruh dirundung masalah dengan diri dengan PDP. Dari beliau, peneliti ingin mendapat informasi dan data mengenai sikap eksploitasi dan ketidakadilan yang dialaminya, saat dulu berurusan dengan PDP. informan “SI” yang usianya 45 tahun. Beliau beretnis madura jember. Ia bertempat tinggal di Sumber Wadung. Tingkat pendidikannya hanya lulusan SD. Beliaulah orang yang pernah sampai mengorbankan nyawa hanya untuk memperjuangkan nasib buruh yang lain.

2. Informan SC

Informan ini hanya lulusan SMP. Tidak jauh berbeda dari informan tambahan sebelumnya. Dari informan ini, peneliti ingin mendapat informasi dan data mengenai bagaimana gambaran upah yang diberikan oleh PDP, dan jam kerja yang diberikan oleh PDP kepada buruh. informan “SC” yang berusia 46 tahun. Beralamat di Sumber Wadung. Ia berpendidikan lulusan SMP. Ia awalnya adalah buruh lepas seperti

informan “SI”, yang gajinya tidak menentu. Namun, sekarang ia dapat bekerja tenang dengan status pekerja tetap.

3. Informan YT

Informan ini merupakan buruh lepas di PDP Sumberwadung. Sama seperti buruh yang lain, ia bertempat tinggal di Sumberwadung. Dari informan ini, peneliti ingin mendapat informasi dan data mengenai advokasi seperti apa yang dilakukan oleh SKeTsa saat menangi permasalahan sempat meruncing itu. Informan “YT” yang berusia 48 tahun. Ia penduduk asli Sumber Wadung yang pernah melakukan transmigrasi ke Aceh hingga karena ada konflik, akhirnya ia pulang lagi ke Jember. Sekarang ia bekerja sebagai buruh tetap seperti kedua temannya di atas, yang diperoleh dari perjuangannya bersama SKeTsa.

4. Informan AM

Informan ini merupakan ketua persirakatan buruh yang ada di Sumberwadung bernama Serbuk (Serikat Buruh Untuk Kesejahteraan). Dari informan ini, peneliti ingin mendapatkan informasi dan data mengenai konsolidasi yang dilakukan saat akan menggerakkan orang banyak, untuk sama-sama berjuang bersama menuntut kesejahteraan kepada PDP. Di usia 45 tahun, informan “AM”, merupakan ketua yang memimpin dan mengoordinir masyarakat buruh untuk sama-sama tidak takut dan berjuang demi kesejahteraan. Beramat di Sumber Wadung, “AM” menempatkan kantor Serbuk (Serikat Buruh untuk Kesejahteraan) di dekat rumahnya. Ia juga masih sering melakukan rapat dengan pendapat, untuk sekadar mendengar keluh kesah masyarakat buruh.

5. Informan AJ

Informan ini merupakan pewarta dari radio, yang berkantor di Jember. Ia termasuk wartawan yang aktif meninjau situasi dan kondisi buruh Sumberwadung. Dari dia juga didapati tambahan informasi dan data mengenai advokasi yang pernah dilakukan LSM SKeTsa melalui kacamata media. informan “AJ”. Ia masih berumur 27 tahun. Dan beralamat di Perum Mastrip Jember. Dari beliau, peneliti mendapat

tambahan data mengenai advokasi yang pernah dilakukan LSM SKeTSA melalui kacamata media.

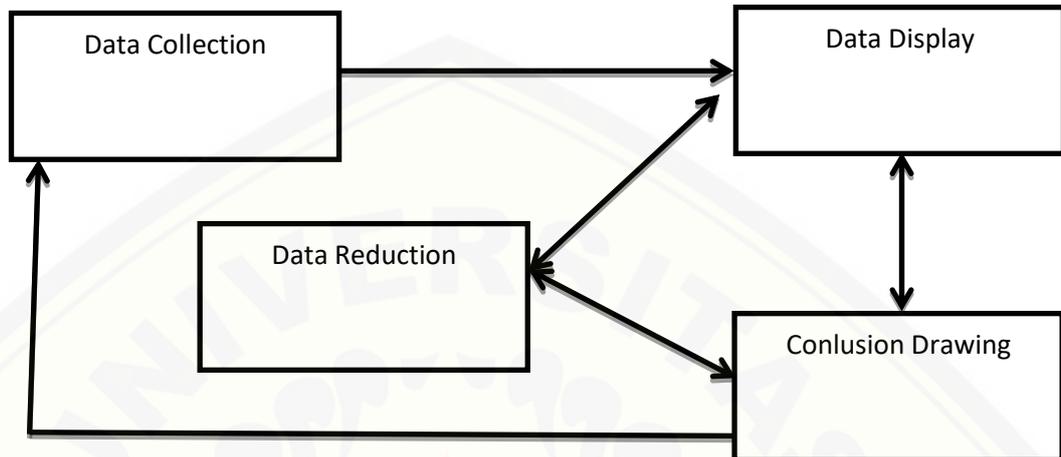
3.6 Teknik Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku pedoman karya tulis ilmiah Universitas Jember (2010:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah, sehingga mampu menjadi informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237), berbicara tentang teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif, artinya berbicara tentang mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Dalam analisa data kualitatif, model interaktif yang digunakan peneliti, merupakan upaya terus-menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul-menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari hasil lapangan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah berupa teks yang bersifat naratif, gambar, tabel, dan angka.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dari Idrus (2009:148), model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, analisis data dapat dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut dianalisis secara lebih mendalam, sehingga memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses coding. Tahap analisis data yang diterakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Senada dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman yang dikutip dari Idrus (2009:148), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan,

yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1 Proses analisis interaktif.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri atas tiga sub proses yang saling terkait, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), pengambilan kesimpulan/verifikasi. Menurut Denzim dan Lincoln (2009:592), menjelaskan bahwa proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, tepatnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian, sewaktu proses pengumpulan data sementara dan analisis awal, serta setelah tahap pengumpulan data akhir. Ada pun penjelas dari analisis interaktif, sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data berarti, bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data dilakukan penyederhanaan. Hal ini, dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja konseptual (*conceptual framewok*), pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, merumuskan tema-tema, pengelompokkan, dan penyajian cerita secara tertulis. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan

selama pengumpulan data berlangsung dilakukan secara terus-menerus sejalan dengan penelitian berlangsung, bahkan proses ini terjadi setelah penelitian lapangan terakhir dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini, dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

b. *Data display* (penyajian data)

Data display (penyajian data), merupakan konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data merupakan bagian kedua dalam tahap analisis. Penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun pemberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Seorang peneliti perlu mengkaji proses reduksi data sebagai dasar pemaknaan. Dengan mencermati kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Penyajian data yang lebih terfokus pada meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, matriks dengan teks daripada angka.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data model interaktif, menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi penetapan makna dari data yang terurai. Cara yang dapat digunakan akan semakin banyak, seperti metode komparasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokkan, metode triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data menjadi sangat penting agar temuan hasil penelitian yang didapat oleh seorang peneliti dapat dipercaya atau diakui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Untuk itu, dirasa sangat perlu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian.

Dalam melakukan pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda, yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data dengan melakukan *cross check* data, misal, peneliti telah mendapatkan data menggunakan teknik wawancara dengan salah satu informan, kemudian data yang diperoleh dari informan akan dilakukan pengecekan ulang dengan data lain. Dengan menggunakan dokumen, atau wawancara dengan informan, dan lain-lain, misalnya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

Dalam penelitian, proses *cross check* disebut triangulasi, merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga dalam penelitian yang berjudul Peran LSM SkeTsa dalam Advokasi Sosial Buruh Perkebunan di Desa Sumberwadung Kecamatan Silo Kabupaten Jember, menggunakan triangulasi dari sumber informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Satori dan Komariah, 2014:56). Sedangkan menurut Sugiyono (2008:273), triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Bila mengacu pada pengertian tersebut, maka triangulasi dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Cara meningkatkan kepercayaan peneliti dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang beragam dan saling terkait satu sama lain. Peneliti musti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Waktu

Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman, dan ketepatan / kebenaran suatu data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

3. Triangulasi Teknik

Penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik, yaitu data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan karena peneliti ingin fokus pada data yang diperoleh dengan membandingkan data dari sumber satu dengan sumber lainnya. Dalam hal ini, perbandingan dilakukan antar informan pokok dengan pokok, pokok dengan tambahan, serta tambahan dengan tambahan. Hingga kemudian hasilnya dikumpulkan menjadi satu sebagai hasil akhir dari penelitian secara keseluruhan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, karena data dan informasi yang diperoleh dari informan satu dengan yang lain harus dicocokkan atau dengan membandingkan pendapat informan yang satu dengan yang lainnya agar keabsahan data tersebut benar-benar terjamin. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencocokkan atau membandingkan informasi yang didapatkan kepada 2-3 informan dalam menguji hipotesis data yang didapatkan. Sehingga mendapat validitas data yang dibutuhkan oleh peneliti agar informasi yang diperoleh nantinya memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pendampingan sosial LSM SKETSA terhadap Buruh Perkebunan di Sumberwadung dapat disimpulkan bahwa LSM SKETSA melakukan praktik-praktik pekerja sosial dalam rangka pendamping agar individu, kelompok maupun masyarakat menjadi berdaya. Hal tersebut diantaranya, Broker atau pialang, mediator, dan pembela (analisis kebijakan dan aktivis sosial). Berikut penjelasan terkait pendampingan sosial LSM SKETSA tersebut:

1. Sebagai Broker, dalam advokasi yang dilakukan oleh LSM SKETSA, peran ini ditunjukkan dengan menghubungkan buruh dengan direksi langsung. Selain itu, LSM SKETSA juga menghubungkan buruh dengan beberapa pihak yang bisa membantu mengatasi permasalahan macam Dinakertras.
2. Sebagai Mediator, peran yang dilakukan oleh LSM SKETSA sebagai mediator adalah menjadi pihak ketiga yang menyelesaikan konflik dalam kelompok dengan musyawarah. Dengan adanya mediator dari buruh dan pihak perusahaan, berpengaruh juga pada tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Meski banyak perbedaan pendapat antar buruh dengan direksi, namun kesewenang-wenang PDP bisa agak ditekan.
3. Sebagai Analisis Kebijakan Serta Aktivis Sosial, yakni LSM SKETSA menjadi badan penganalisis keadaan serta situasi, semisal kenapa gerakan dan aksi selalu gagal. Sekaligus LSM SKETSA menjadi aktivis sosial yang terjun langsung mengatasi permasalahan. Misal, pada waktu meminta bantuan kepada LBH Surabaya, LSM SKETSA mendampingi serta melakukan followup atas semua itu. Dan ikut demo bersama buruh yang dilakukan di depan Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Perkebunan Jember, dan Kantor Disnakertrans.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu adanya saran dalam Advokasi yang dilakukan LSM SKETSa pada buruh perkebunan di Sumberwadung, yakni sebagai berikut:

1. Meski buruh di Sumberwadung berhasil melakukan perlawanan serta perjuangan untuk mengambil haknya. Dan juga LSM SKETSa berhasil membentuk serikat buruh yang dinamai Serbuk (Serikat Buruh Untuk Kesejahteraan), namun mereka masih kesulitan dalam hal kelembagaan, misal mencari relasi-relasi untuk mengembangkan serikatnya. Misal untuk pembuatan sekretariat permanen, alat dan kelengkapan untuk ketik mengetik, dan peralatan lainnya.
2. Adanya buruh yang pensiun, kemudian digantikan dengan buruh yang baru. Berikut juga orang-orang yang berada pada jajaran direksi PDP juga akan silih berganti, hal ini akan mengancam posisi buruh. Karena setiap pergantian orang akan ada kebijakan yang baru juga, biasanya. Maka hal ini yang perlu diantisipasi oleh Serbuk. Dan tugas LSM adalah mendidik serta melatih buruh untuk siap menghadapi masa depan.
3. Meski LSM SKETSa telah berhasil melakukan advokasi sosial. Namun masih sedikit buruh yang mendapat hasil secara total dari advokasi yang dilakukan. Hanya ada sekitar 15 orang. Sedang yang lain hanya merasakan sedikit imbas dari kegiatan advokasi sosialnya.
4. Karena buruh tidak hanya hidup di masalah. LSM perlu memberi kemampuan untuk buruh siap menghadapi masa depan dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Misal pendidikan yang disusun dan dirumuskan untuk jangka panjang.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Taufik. 2006. *Pemudaran Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3S
- Adi, Ibandi R. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara
- Astria, rierin. 2009. *Kinerja NGO*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baeur, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparasion of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati-Clermont.
- Bogdan dan Taylor. 1997. *Intriduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in The Social Sciencies*, alih bahasa Arief Furchman, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional.
- Bungin, Burham. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Denzim, N. K. & Lincoln, Y. S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Eeng dan Epi. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Eldridge, Phillip J. *Non-Goverment Organization and Democratic Participation in Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar. 2000. *Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- George Ritzer & Douglas J.Goodman.2011.*Teori Sosiologi, Edisi terbaru*. Bantul:Kreasi Wacana
- Ghony, M.D dan Almanshur, F. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Erlangga.

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kristeva, Nur Sayyid. 2015. *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas' oed. 2013. *Posisi dan Peranan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Merto, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Miryam S. V. Nainggolan. 2004. *Advokasi Dalam Pengembangan Sosial Masyarakat*. Bahan diskusi tanggal 09 Juli 2017. Jember: LSM SKeTsa.
- Moleong, J Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murbiyanto, dkk. 1998. *Perkebunan dimasa depan*. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paulus, Wirutomo. 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Rudi Wibowo, Zulfikar, Hadi Paramu, dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Sanit, Arbi. *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Schneider, R. L. & Lester, L. (2001). *Social Work Advocacy: A New Framework For Action*. Belmont, CA: Brooks/Cole Thomson Learning.
- Sentot. 2010. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sheafor, W. B., Horejsi, R.C. 2003. *Techinques and Guidelines for Social Worker Practice*. Boston: Allyn & Bacon.
- Soehandy. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Lahan*. Tesis.
- Soekamnto, Soerjono. 2010. *Sosilogi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.

Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Sumarto, Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Usman, H & Akbar, PS. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Grafindo.

Yudohusodo, Siswono, dkk. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Inkopol.

Undang-undang

Undang-undang ketenagakerjaan.

Skripsi

Maharani, Aprilia. 2015. *Bentuk Eksploitasi dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.

Nainggolan, Anggiat Saputra. 2014. *Peran Federrasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kaum Buruh di Berbek Industri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Online

Djunaidy, Mahbub. 2013.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/058473961/buruh-perkebunan-jember-tolak-kehadiran-investor>

<http://journal.unair.ac.id/filePDF/156-166%20%20%20Valihudin%20Rizal.pdf>

<http://rumahkiri.net/rumah-kiri-alternatif-kaum-progresif>

<http://www.dikmenum.go.id/kelayakan-upah>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pendidikan-politik-fungsi>

<https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/358>

id.wikipedia.org/wiki/perkebunan.

Kusmandani, Syaiful. 2014. *Ratasan Buruh Perkebunan di Jember Tuntut Kesejahteraan*.

<http://detik.com/news/read/2014/08/06/104110/26544337/4/74/ratasan-buruh-perkebunan-di-jember-tuntut-kesejahteraan>.

Putro, Dwi. 2010. *Keadilan Bagi Buruh Perkebunan: Membangun Kesadaran dan Memperjuangkan Penegakan Hukum Yang Adil*. Artikel diterbitkan.

<http://media.leideuniv.nl/legacy/widodo-dwi---putro---final---19-june-2010---final-version.pdf> (5 Juni 2014)

www.bpkp.go.id/uu/.../2/39/224.bpkp.

